

# **RESISTENSI KOMUNITAS DAYAK HINDU-BUDHA BUMI SEGANDU LOSARANG**

Terhadap Gerakan Islamisasi di Indramayu



Diterbitkan Oleh  
Pustaka STAINU Jakarta

JUMHARI



**STAINU JAKARTA**

RESISTENSI KOMUNITAS DAYAK HINDU-BUDHA BUMI SEGANDU  
TERHADAP GERAKAN ISLAMISASI DI INDRAMAYU





RESISTENSI KOMUNITAS DAYAK HINDU-BUDHA BUMI SEGANDU  
TERHADAP GERAKAN ISLAMISASI DI INDRAMAYU

JUMHARI 2015

Vi+101 Halaman 14 x 21

Satting dan Lay- out : Moh.Riyan

Desain Cover : Alamul Huda

Diterbitkan Oleh :

Pustaka Stainu

Jalan Taman Amir Hamzah No.05 Jakarta Pusat

E-maile : [admin\\_stainu@gmail.com](mailto:admin_stainu@gmail.com)

Cetakan I September 2015

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## **PERSEMBAHAN**

**Buku ini saya persembahkan untuk ayahanda tercinta  
“Suhri” dan ibunda terkasih “Rumsiti”**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah Swt Tuhan pencipta semesta alam yang telah memberikan inayah kepada saya sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam selalu saya sampaikan kepada baginda Muhammad Saw, berkat jasa-jasa beliau saya dapat mengenal dan meyakini Islam sebagai agama yang diridhai Allah Swt. Ucapan terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada *almarhum* ayahanda Suhri dan *almrhumah* ibunda Rumsiti beliau berdua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada istri tercinta Wiwi Fasiah yang telah setia mendampingi saya, dan juga anak-anakku tersayang Widad Muhtaghiya Fadlah, dan Najma Barnamij, serta ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada pengasuh dan seluruh jajaran Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati, Patrol Indramayu yang telah memotivasi saya untuk merampungkan buku ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Deny Hamdani, Ph.D, yang tulus ikhlas membimbing saya dalam menulis. Juga untuk Bapak Dr. Muh.Ulinnuha yang telah memberikan kritik membangun terhadap tulisan saya. Sembah ta'dzim dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Umum PBNU Pusat, Prof.Dr.KH. Said Aqiel Siradj, MA. Kepada seluruh petinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama (STAINU) Jakarta, Prof. Dr. Ishom Yusqi, MA, ( Direktur Pascasarjana Islam Nusantara), Prof. Dr. Mujib Qolyubi, Dr.Zastrow el-Ngatawi, M.Si, Dr. Mamat S. Bahrudin, MA. dan teman-teman semua kelas Pascasarjana STAINU Jakarta.

Harapan besar saya semoga buku ini memberikan kemanfaatan bagi semuanya, baik untuk diri saya dan juga pembaca, serta mudah-mudahan buku ini bisa dijadikan rujukan dalam kajian Islam Nusantara.

Jakarta, 29 September 2015

Penulis

## KATA PENGANTAR

Selama hampir setahun saya mengamati satu komunitas yang unik di daerah Losarang Indramayu. Kebetulan tempat mereka takjauh dari tempat tinggal saya saat ini. Mereka menamakan dirinya Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu. Saya sempat salah tafsir dengan istilah Hindu-Budha yang disematkan pada akhir nama komunitas ini, sejenak saya mengira mereka bagian dari kepercayaan agama Hindu atau Budha, tetapi ternyata mereka adalah komunitas independen yang tidak mengikatkan diri pada salah satu agama, organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, partai politik tertentu, maupun organisasi kemasyarakatan.

Istilah suku Dayak yang mereka kenakan sebagai identitas kelompok ini, bukanlah “suku” dalam etnik (suku bangsa), melainkan sebuah istilah dalam bahasa Jawa Indramayu. Demikian pula kata “Dayak” bukan dalam arti suku bangsa Dayak, melainkan juga diambil dari kata dalam bahasa Jawa Indramayu, yang artinya menyaring/memilih.

Keberadaannya sejak tahun 1982 cukup menyedot perhatian publik atau bahkan pemerhati etnis dan budaya. Sejalan dengan perkembangannya komunitas ini kemudian memunculkan



masalah baru di lingkungan masyarakat sekitar. Yang paling terasa adalah ketika mereka berbenturan dengan pemangku kebijakan pengatur tata agama yaitu Majelis Ulama Indonesia(MUI) Kab.Indramayu.

Pelabelan sesat oleh MUI pada Suku Dayak Bumi Segandu pada awalnya tidak begitu mendapat reaksi serius dari mereka, tetapi kemudian resisitensi itu semakin kuat dilakukan oleh mereka. Sejak tahun 2007, dimana fatwa sesat MUI Kabupaten Indramayu dikeluarkan, Takmad bersama beberapa perwakilan komunitas adat yang dipimpinnya mencoba melakukan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Takmad berpendapat bahwa kepercayaan dan keyakinan yang dijalankannya selama ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban perlindungan negara.

Dari semua informasi yang saya peroleh dari penelitian ini, menjadi catatan panjang yang kemudian diruntut dan dikemas dalam buku ini. Buku ini diberi tema “*Resistensi Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu terhadap Gerakan Islamisasi di Indramayu*”. Judul ini dipilih karena penulis beralasan bahwa kajian etnografi, budaya dan tradisi pada komunitas ini sudah banyak yang meneliti, sehingga saya fikir ruang kosongnya adalah

bagaimana persentuhan mereka dengan Islam. Disamping itu juga saya tertarik dengan bentuk resistensi mereka terhadap gerakan Islamisasi, padahal tidak bisa dipungkiri bahwa pimpinan mereka Takmad Diningrat awalnya adalah orang yang pernah memilih Islam sebagai keyakinannya.

Akhirnya harapan saya semoga buku ini bisa dijadikan rujukan bagi diskusi ilmiah tentang Islam, terutama demi kemajuan kajian Islam Nusantara.

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>1</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	12
F. Lokasi Penelitian .....	27
G. Metode Penelitian .....	27
H. Tinjauan Pustaka .....	31
I. Sistematika Penulisan .....	44

### **BAB II GAMBARAN UMUM KOMUNITAS SUKU DAYAK HINDU-BUDHA BUMI SEGANDU LOSARANG**

A. Gambaran Umum Kecamatan Losarang.....	46
B. Sejarah dan Perkembangan Kepercayaan Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang.....	49

C. Prinsip Hidup dan Kepercayaan Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang .....	54
D. Ritual Kepercayaan Komunitas Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang .....	57
E. Adaptasi Prinsip Keislaman dalam Ajaran Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang .....	61

### **BAB III GERAKAN ISLAMISASI DI INDRAMAYU DAN PERSENTUHANNYA DENGAN KOMUNITAS SUKU DAYAK HINDU-BUDHA BUMI SEGANDU LOSARANG**

A. Gerakan Islamisasi dan Perundang-undangan Hukum Islam di Indramayu.....	69
B. Gerakan Islamisasi dan Fatwa Sesat MUI Kabupaten Indramayu terhadap Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang .....	76

### **BAB IV PERLAWANAN SUKU DAYAK TERHADAP GERAKAN ISLAMISASI DI INDRAMAYU**

A. Sikap Suku Dayak terhadap Fatwa Sesat MUI Kabupaten Indramayu.....	87
B. Bentuk Perlawanan Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu terhadap Islamisasi di Indramayu .....	89
C. Tawaran Solusi dan Titik Temu .....	96

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan .....	98
------------------	----

## **Abstrak**

*Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah menyoroti tentang proses perlawanan yang dilakukan Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang atas fatwa sesat yang dikeluarkan MUI Kabupaten Indramayu dalam menyikapi tradisi dan keyakinan mereka, serta perlawanan terhadap gerakan Islamisasi yang ditandai dengan munculnya gagasan penerapan perundang-undangan daerah (perda) berbasis syariah. Studi ini dimulai dari penyajian data tentang fenomena gerakan Islamisasi, pemberlakuan perda syariah, serta penerbitan fatwa sesat oleh MUI Kabupaten Indramayu pada tahun 2007 yang berimbas pada terancamnya keberlangsungan kebebasan berkeyakinan dan keberlangsungan tradisi lokal yang telah dijalankan oleh Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang karena dianggap berseberangan dengan hukum Islam. Dengan menggunakan pandangan teori perlawanan dan wacana gerakan dakwah dengan paradigma puritanisme keagamaan, studi ini menghimpun dua hal bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang, yakni perlawanan secara doktrin dan kultural yang disampaikan dan dijalankan di dalam komunitas tersebut, serta, kedua, perlawanan melalui aksi pengabaian fatwa dan perjuangan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini adalah bagian dari bentuk dokumentasi atas perlawanan sebuah masyarakat sub-kultur terhadap kebijakan maupun perspektif institusi atau penganut agama mayoritas yang dianggap kurang begitu mempertimbangkan aspek masyarakat lokal.*

**Kata kunci:** *Dayak Losarang, Fatwa Sesat, MUI, Perda Syariah.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Selain sebagai sebuah perangkat spiritual ketauhidan, Islam selaku agama dapat dipandang sebagai serangkaian konsep yang juga mengatur kebaikan hidup orang banyak. Dalam hal ini, Islam dituntut tampil berbeda dengan agama sebelumnya. Tanpa adanya batasan tempat dan masa, pada akhirnya Islam harus *Shalihun li kulli zaman wal makan* (sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat), terus bergerak secara dinamis, responsif dan memiliki prinsip adaptabilitas guna menghadapi keniscayaan perubahan zaman dan keberagaman konteks, tradisi, serta identitas umatnya yang beragam dan variatif.

Dalam bingkai sejarah peradaban, kehadiran Islam pada mulanya mengemban tugas sebagai sebuah tawaran solusi di tengah ketidak-teraturan bangsa Arab yang bertendensi pada kekuatan kelas sosial dan garis nasab serta eksklusivitas kabilah yang berimbas pada biasanya unsur keadilan dan kemanusiaan<sup>1</sup>.

Hukum agama masa awal Islam kemudian berkembang menjadi fiqh, yurisprudensi karya korps ulama pejabat pemerintah (qadi, mufti, dan hakim) dan ulama 'non-korpri'. Kekayaan sangat beragam itu lalu disistematiskan ke dalam beberapa buah

---

<sup>1</sup> Quraisy Shihab, M. Tafsir Al-Misbah, *Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2003, Vol.15, *hal* 261-263.

mazhab fiqh, masing-masing dengan metodologi dan pemikiran hukum (*legal theory*) tersendiri<sup>2</sup>.

Dalam mengamati perjalanan sejarah Islam seperti di atas, akan ditemukan bahwa agama (Islam) bersumberkan wahyu dan memiliki norma-normanya sendiri. Karena bersifat normatif, maka ia cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah buatan manusia, karenanya ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya<sup>3</sup>.

Perkembangan dan penyebaran agama Islam yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi, waktu dan tempat ini menghadirkan sebuah pandangan dakwah secara dialogis bahkan akomodatif terhadap kreasi budaya lokal. Pada titik ini, komunikasi yang kuat dengan budaya lokal dalam perjalanan panjang penyebaran agama Islam akan semakin kentara jika dilihat pada saat dakwah Islam mulai menyentuh dan memasuki kawasan-kawasan induk kebudayaannya yang serba Arab, termasuk Indonesia.

Banyak yang menyebutkan jejak awal perkembangan Islam di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Arab sebagai komunitas pertama yang memiliki sentuhan dengan ajaran yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad ini. Gujarat, India, kerap dianggap memiliki peran penting sebagai wilayah yang telah mengirimkan para pendakwah Islam guna mewarnai kawasan Asia

---

<sup>2</sup> KH Abdurrahman Wahid, "*Salahkah Jika Dipribumikan?*", Tempo, 16 Juli 1983.

<sup>3</sup> KH Abdurrahman Wahid, "*Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*", Depok: Desantara, 2001.

Tenggara, termasuk Indonesia<sup>4</sup>. Latar belakang yang tidak melulu murni sebagai pendakwa dan memanfaatkan mobilitasnya sebagai pedagang saat itu turut memengaruhi bagaimana corak penyampaian ajaran agama ini disampaikan. Seperti halnya keberhasilan para da'i di abad ke-16 dan 17 yang disebabkan oleh cara dakwah mereka yang menunjukkan hubungan yang dialogis, akomodatif, dan adaptif terhadap masyarakat setempat. Inilah yang kemudian menyebabkan Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Di sisi lain, penyebaran Islam secara etnografis dan geografis tersebut tidak selalu berjalan mulus tanpa ketegangan. Karena di lain pandangan, gerakan dakwah yang dilakukan dengan mempertimbangkan eksistensi budaya lokal yang ada justru dinilai melahirkan gangguan bahkan penyimpangan terhadap doktrin-doktrin Islam yang bersifat pokok dan normatif. Salah satu proses ketegangan yang kerap mengiringi dalam perjalanan dakwah Islam di Indonesia adalah munculnya kelompok puritan Islam yang menolak segenap tawaran pola dakwah yang dialogis, termasuk menolak keberadaan filsafat, tradisi, tawawuf, dan segenap hal yang dianggap sebagai perangkat yang dibentuk guna memahami dan menghapus kekhawatiran tersebut<sup>6</sup>.

Pola dakwah yang dilakukan oleh kelompok puritanisme sering mengatasnamakan identitas gerakan Islamisasi. Munculnya gerakan tersebut biasanya berlangsung sebagai dampak dari anggapan perlunya meluruskan kembali ajaran Islam yang menurut

---

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara*, hal. 32.

<sup>5</sup> Khamami Zada, "Mengantar Da'i sebagai Pendamping Masyarakat" dalam *Dakwah Transformatif*, PP. Lakpesdam NU, 2006.

<sup>6</sup> KH Abdurrahman Wahid, "Salahkah Jika Dipribumikan?", *Tempo*, 16 Juli 1983.



mereka telah terkontaminasi oleh tradisi-tradisi masyarakat lokal. Di beberapa babak lain, gerakan ini juga mengumandangkan pentingnya kembali memurnikan ajaran Islam sesuai dengan petunjuk otentik Al-Quran dan Hadits.

Proses penyebaran ajaran Islam dengan pola yang berbeda ini pada akhirnya tidak hanya memberikan dampak dan hasil yang berbeda pula. Belakangan, keduanya saling berhadapan dalam letupan konflik internal Islam. Hasil dakwah dengan pola pendekatan budaya seperti ritual *tahlilan*, *ziarah*, *ngalap berkah* dan lain sebagainya dianggap oleh kaum puritanisme dengan mengatasnamakan gerakan Islamisasi yang total sebagai bagian yang masuk pada definisi kategori *bid'ah*, *tahayul*, dan *khurafat* dan sekaligus sebagai target dari sasaran pelurusan dan pemurnian ajaran Islam.

Dalam keberlangsungan Islam di kehidupan masyarakat modern, pola pertentangan antara dakwah Islam yang menjadikan dan menganggap budaya lokal sebagai bagian dari spirit keagamaan dan kelompok yang mengusung gerakan Islamisasi di Indonesia mengalami seri perdebatan yang berkembang pula. Sebagian dari kelompok puritanisme turut mendorong bahkan menekan sistem perangkat hukum positif negara dan masyarakat untuk memasukkan formalisasi Islam melalui perundang-undangan syariat.<sup>7</sup>

Fenomena formalisasi syariat Islam yang masuk ke dalam perangkat undang-undang positif di Indonesia merebak

---

<sup>7</sup> Nurrohman, “*Syari’at Islam, Negara Islam dan Transformasi Hukum Islam*”, Forum Studi Asy-Syari’ah; Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, volume 25, Nomor 2, Juli-Desember 2002.

seiring diberikannya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk secara leluasa menyusun produk perundang-undangnya sesuai pertimbangan masukan dari masyarakat setempat. Di mulai dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan berbagai daerah, gejala tersebut masuk juga ke Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Gagasan-gagasan formalisasi Islam melalui perundang-undangan daerah tentunya memicu perlawanan dari kelompok-kelompok masyarakat tradisional di dalamnya, di antaranya Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang Kabupaten Indramayu.

Dalam hal ini, Dayak di Kalimantan dapat dijadikan referensi karena masalah yang dihadapi Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang hampir sama, hal ini terlihat bagaimana kepercayaan Dayak harus menerima kenyataan pahit mengikuti agama resmi yang ditetapkan pemerintah. Agama resmi secara perlahan menghancurkan tatanan budaya, politik dan keagamaan suku Dayak Kalimantan. Struktur fungsional melihatnya sebagai ancaman disintegrasi atau disfungsi yang dialami oleh sistem sosial, di mana sistem ini tidak mampu mengadaptasikan sistemnya karena faktor eksternal yang memaksa mereka untuk berubah.

Kehancuran tatanan sosial budaya, ekonomi politik dan keagamaan pada masyarakat Dayak Kalimantan diakibatkan oleh tiga tingkatan. *Pertama*, adalah tingkatan *verbal*, pada tingkatan ini praktik-praktik budaya, ekonomi dan religius. Dayak dipandang sebagai keterbelakangan, primitif, yang identik dengan animisme dan dinamisme. Hal itu mempengaruhi citra masyarakat Dayak

yang akhirnya memojokannya menjadi suatu kelompok yang dikucilkan oleh masyarakat luar Dayak. Praktik-praktik yang menggambarkan masyarakat Dayak seperti di atas terjadi di mana-mana mulai di sekolah-sekolah, kantor, dan media-media. Hal ini yang menyebabkan keberadaan suku Dayak tertekan secara psikologis. Gambaran-gambaran negatif tentang Dayak ini dapat menghancurkan tatanan sosial masyarakat Dayak karena semakin banyaknya orang-orang Dayak yang mulai meninggalkan kebiasaan hidupnya sebagai orang Dayak.

Penghancuran *kedua* adalah karena tingkatan *behavioral*, dari adanya perilaku pendatang yang membawa budaya baru modernisasi. Segala bentuk kemewahan modernisasi tentu saja sangat menggurikan, dengan gaya hidup serba gemerlap dan tawaran kemewahan menggoda orang-orang Dayak untuk keluar dari tradisi-tradisi kolotnya. Keberadaan pendatang dengan gaya hidup modern dipandang sebagai buah pembangunan, lambat laun kehancuran tatanan sosial budaya Dayak tidak dapat terelakan.

Tingkatan yang *ketiga* adalah tingkatan *performance*, yaitu perampasan tanah, penghancuran hutan, penggusuran tanah-tanah keramat yang merupakan basis dan kiblat kehidupan orang-orang Dayak.

Menghadapi ancaman dari tiga tingkatan di atas setidaknya terdapat resistensi, pada tingkatan *verbal*. Resistensi terlihat ketika masyarakat Dayak Kalimantan mencoba tidak mengindahkan intimidasi verbal dari kalangan modernis. Dari tingkatan *behavioral* sebagian orang Dayak tidak mau mengikuti gaya hidup yang dicontohkan masyarakat modern. Resistensi berupa perlawanan fisik terhadap usaha-usaha perampasan tanah

seperti yang terjadi di tahun 1994, sekitar 1.600 orang Dayak membakar *base camp* PT Lingga Tejawana yang mengusir dan merampas tanah mereka.<sup>8</sup>

Hal itu merupakan upaya bagaimana masyarakat Dayak berusaha mempertahankan tatanan sosialnya agar tidak hancur terperdaya arus modernisasi. Dari sana kita dapat melihat potensi-potensi konflik yang dapat terjadi, salah satunya adalah perebutan wilayah ekonomi dengan pendatang merupakan ladang konflik yang sangat potensial.

Dari kasus Dayak di Kalimantan setidaknya kita dapat menengok ke belakang mengenai permasalahan yang dihadapi Dayak dan kepercayaan lokalnya. Tentu ini tidak berkaitan, namun memiliki kesamaan dalam mempertahankan sistem juga menjaga harmoni sampai kepada konflik yang dihadapi. Peneliti sengaja menuliskannya dalam latar belakang ini setidaknya untuk membedakan antara Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang dengan suku Dayak yang ada di Kalimantan. Eksistensi Dayak Indramayu tidak saja tanpa hambatan, bahkan pada akhirnya mereka menerima tuduhan dari MUI (Majlis Ulama Indonesia) mengenai fatwa sesat. Walaupun demikian eksistensi komunitas ini tetap berjalan seperti biasa.

Keberadaan komunitas apapun tidak terlepas dari dukungan masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana aliran ini beradaptasi dengan lingkungan. Fatwa sesat yang dikeluarkan MUI tidak mengubah apapun, nyatanya komunitas ini tetap hidup rukun bersama warga sekitar yang

---

<sup>8</sup> Stepanus Djuweng dkk, *Kisah Dari Kampung Halaman Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan*, Yogyakarta, 1996, hlm. 6

mayoritas Islam. Meskipun dikatakan sesat sebagian masyarakat Indramayu sepertinya tidak rela jika aliran ini dibubarkan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar buat penelitian kali ini, apa yang membendung terjadinya konflik sehingga komunitas yang dipimpin oleh Takmad Diningrat ini masih tetap utuh bahkan berkembang.

Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang merupakan satu kelompok masyarakat tradisional di Kabupaten Indramayu yang kerap terlibat dalam perlawanan terhadap gerakan Islamisasi di wilayahnya. Pada mulanya, Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang memang lahir dari tradisi masyarakat penganut Islam secara keumuman. Takmad Diningrat, tokoh utama dibalik eksistensi komunitas pada mulanya bersentuhan erat dengan sebuah padepokan bela diri yang kental dengan nuansa Islam. Dalam perjalanannya, Takmad lebih memilih untuk keluar dari Islam secara pribadi dengan dalih sebuah agama tidak menjamin keteraturan sikap hidup seseorang.<sup>9</sup>

Puncak perlawanan Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Losarang terjadi pada tahun 2007. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu mengeluarkan fatwa sesat dan mendorong instansi pemerintah terkait untuk membubarkan paksa segenap aktifitas yang dilakukannya<sup>10</sup>. Namun Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Losarang tidak tinggal diam, upaya-upaya perlawanannya terus dilakukan hingga

---

<sup>9</sup> Wawancara bersama Takmad Diningrat, pimpinan Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang, 26 April 2015

<sup>10</sup> Radar Cirebon, Edisi Senin, 24 September 2007

menjaga eksistensi kelompok masyarakat tersebut hingga sekarang<sup>11</sup>.

Atas dasar pemaparan di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses resistensi Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang terhadap gerakan Islamisasi di Kabupaten Indramayu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah proses dan gerakan Islamisasi di Kabupaten Indramayu terhadap Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang?
- b. Bagaimana pandangan dan bentuk perlawanan (resistensi) Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang terhadap gerakan Islamisasi di Indramayu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi proses dan sikap gerakan Islamisasi di Kabupaten Indramayu terhadap Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang.
- b. Menganalisis pandangan dan bentuk perlawanan (resistensi) Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang terhadap gerakan Islamisasi di Indramayu.

---

<sup>11</sup> “Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang Abaikan Vonis MUT” diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/84304/dayak-losarang-abaikan-vonis-mui>, pada tanggal 30 April 2015, pukul 20.00 Wib.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat praktis, bagi penulis, dari seluruh tahapan serta hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai bentuk resistensi Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang terhadap gerakan Islamisasi di Indramayu. Selain itu juga mendapatkan pengetahuan mengenai cara pandang Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang terhadap kepercayaan dan ritual tradisi yang mereka jalani serta terhadap pola-pola keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat secara keumuman. Melalui penelitian ini, penulis juga mendapatkan data yang lebih faktual dan otentik mengenai sejarah dan perkembangan Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang guna mengimbangi kesan dan informasi yang bersumber dari masyarakat luar.
- b. Manfaat Akademis. Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu yang mengkaji tentang pandangan Islam terhadap keragaman komunitas, metode dakwah yang dialogis, serta ragam kepercayaan berbasis kebudayaan lokal yang merupakan bagian dari objek pengetahuan studi Islam Nusantara.

## **E. Kerangka Teori**

Untuk memperkuat dan melandasi penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa konsep dan teori yang relevan dengan masalah penelitian. Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Resistensi dan Islamisasi.

### **F.1. Resistensi**

Teori resistensi pertama kali dikenalkan oleh para ilmuwan sosial guna mengkaji masalah-masalah bersifat empiris. Teori resistensi mulai merebak dan banyak digunakan di akhir dekade 1960-an. Bagi para peneliti sosial, resistensi dianggap berciri kultural, sebab ia muncul melalui ekspresi serta tindakan masyarakat. Analisa resistensi terhadap suatu fenomena banyak melihat hal-hal yang berada di tengah masyarakat, berupa kisah-kisah, tema pembicaraan, umpatan, serta puji-pujian dan perilaku lainnya sehingga resistensi menjadi gayung bersambut dalam keilmuan sosial.<sup>12</sup>

Pada mulanya tema resistensi mencuat di saat banyaknya otokritik terhadap ilmu-ilmu sosial yang dianggap menganut paradigma positivistik yang kerap mereduksi makna manusia menjadi sekumpulan angka-angka dan kehilangan semangat untuk perubahan.

Dalam khazanah Antropologi benih-benih kritik internal atau refleksi yang dapat dilihat sebagai upaya resistensi telah muncul terhadap arus besar keilmuan antropologi saat itu. Kritik tersebut mencuat ketika Talal Asad mengeluarkan buku berjudul

---

<sup>12</sup> Yusran Darmawan, “*Resistensi dalam Kajian Antropologi*”, diakses dari <http://www.timur-angin.com/2009/08/resistensi-dalam-kajian-antropologi.html> diakses pada tanggal 30 April 2015.



*Anthropology as Colonial Encounter*. Ia melihat bahwa realitas para antropolog masih terharu-biru oleh imajinasi para penjajah Eropa yang terobsesi menemukan masyarakat primitif untuk dianalisa dan ditekuk dalam satu kategori.<sup>13</sup> Imaji tentang penaklukan, kekuasaan, serta menemukan masyarakat primitif dan eksotik telah membimbing antropolog pada bentuk etnografi. Poin penting yang dipetik Talal Asad adalah mereka para antropolog (ilmuwan sosial) masih terbelenggu dalam dikotomi masyarakat primitif dan modern sehingga seakan-akan terdapat sebuah ego bahwa primitif itu adalah barbar dan tak berperadaban.

Berbeda dengan peneliti sosial sebelumnya, Lila Abu-Lughod mencoba menggambarkan dalam penelitiannya mengenai resistensi perempuan di sebuah komunitas Bedouin, Gurun Mesir Barat. Penelitian dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana kaum yang tersisihkan (perempuan) melakukan perlawanan terhadap struktur yang ada. Lila mencoba mengangkat bagaimana strategi dan bentuk perlawanan di dalam struktur budaya yang mengekang hak-hak kaum perempuan.

Lila Abu-Lughod mengungkapkan resistensi dalam tulisannya sebagai berikut:

*“ ... resistance is, I would argue, a growing disaffection with ways we have understood power, and the most interesting*

---

<sup>13</sup> Yusran Darmawan, “Resistensi dalam Kajian Antropologi”, diakses dari <http://www.timur-angin.com/2009/08/resistensi-dalam-kajian-antropologi.html> diakses pada tanggal 30 April 2015.

*thing to emerge from this work on resistance is a greater sense of the complexity of the nature and forms of domination...*<sup>14</sup>

(... perlawanan, saya berpendapat, sebuah ketidakpuasan yang berkembang dengan cara-cara kita memahami kekuatan, dan hal paling menarik yang muncul dari ini bekerja pada resistensi adalah rasa yang lebih besar dari kompleksitas sifat dan bentuk-bentuk dominasi).

Dari beberapa fakta yang didapatkannya mengenai bentuk perlawanan perempuan terhadap kuasa laki-laki dalam struktur sosial, ia mengungkapkan bahwa sesungguhnya untuk mempelajari hal tersebut diperlukan interpretasi dalam memotret fenomena sehingga akan membawa kita pada berbagai bentuk relasi di dalam struktur komunitas yang saling bertalian. Lila juga menganjurkan resistensi sebagai sebuah strategi untuk menganalisa kuasa (*resistance as a diagnostic of power*). Hal tersebut ia dapat setelah terinspirasi dari tulisan Foucault, sesungguhnya di mana ada kekuasaan di situ terdapat resistensi (*where there is power, there is resistance*).<sup>15</sup>

Kekuasaan, sebagaimana yang dikemukakan Weber merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan.<sup>16</sup> Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan

---

<sup>14</sup> Lila Abu-Lughod, "*The Romance of Resistance: Tracking Transformation of Power Trough Bedouin Women*" diakses dari <http://www.jstor.org/pss/645251> pada tanggal 30 April 2015.

<sup>15</sup> Lila Abu-Lughod, "*The Romance of Resistance: Tracking Transformation of Power Trough Bedouin Women*" diakses dari <http://www.jstor.org/pss/645251> pada tanggal 30 April 2015.

<sup>16</sup> , George Ritzer, *Sociological Theory*, Fifth edition, University Of Maryland. 2000

hadirnya situasi ketidakadilan di tengah- tengah mereka.<sup>17</sup> Jika situasi ketidakadilan dan rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) gerakan sosial atau social movement, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya.<sup>18</sup>

Scott (2000) mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superordinat terhadap mereka. Scott (2000) membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*).<sup>19</sup>

Kedua kategori tersebut, oleh Scott (2000), dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas - kelas subordinat dengan kelas- kelas superordinat. Sementara perlawanan sembunyi- sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas- kelas subordinat dengan kelas- kelas superordinat.

Untuk melihat perbedaan yang lebih jelas dari dua bentuk perlawanan di atas, Scott (2000) mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat: 1) organik, sistematis dan kooperatif, 2) berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri, 3)

---

<sup>17</sup> Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Idiologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*, Yogyakarta. 2002

<sup>18</sup> Sidney Tarrow, *Power in Movement*, Vol. 18, No. 1 (Mar., 1997), pp. 181-183

<sup>19</sup> James Scott. C, 1981, *Moral ekonomi Petani, Pergola kan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta. 1981

berkonsekuensi revolusioner, dan / atau 4) mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi. Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan (dan lain- lain) merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinat (Tarrow, 1994).

Menurut Fakih (Zubir, 2002), gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena memiliki orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan tujuan, dan bukan kesamaan analisis. Mereka tidak bekerja menurut prosedur baku, melainkan menerapkan struktur yang cair dan operasionalnya lebih diatur oleh standar yang muncul saat itu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mereka juga tidak memiliki kepemimpinan formal, seorang aktivis gerakan sosial tampil menjadi pemimpin gerakan karena keberhasilannya mempengaruhi massa dengan kepiawaiannya dalam memahami dan menjelaskan tujuan dari gerakan serta memiliki rencana yang paling efektif dalam mencapainya (Zubir, 2002).

Soekanto dan Broto Susilo memberikan empat ciri gerakan sosial, yaitu: 1) tujuannya bukan untuk mendapatkan persamaan kekuasaan, akan tetapi mengganti kekuasaan, 2) adanya penggantian basis legitimasi, 3) perubahan sosial yang terjadi bersifat massif dan pervasive sehingga mempengaruhi seluruh masyarakat, dan 4) koersi dan kekerasan bisa dipergunakan untuk menghancurkan rezim lama dan mempertahankan pemerintahan yang baru.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta. 1984,

J. Smelser menyatakan, bahwa gerakan social ditentukan oleh lima faktor. Pertama, daya dukung struktural (*structural condusiveness*) di mana suatu perlawanan akan mudah terjadi dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang berpotensi untuk melakukan suatu gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan (seperti lingkungan kampus, buruh, petani, dan sebagainya). Kedua, adanya tekanan- tekanan struktural (*structural strain*) akan mempercepat orang untuk melakukan gerakan massa secara spontan karena keinginan mereka untuk melepaskan diri dari situasi yang menyengsarakan.<sup>21</sup>

Ketiga, menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas untuk membangun perasaan kebersamaan dan juga dapat menimbulkan kegelisahan kolektif akan situasi yang dapat menguntungkan tersebut. Keempat, faktor yang dapat memancing tindakan massa karena emosi yang tidak terkendali, seperti adanya rumor atau isu- isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. Kelima, upaya mobilisasi orang-orang untuk melakukan tindakantindakan yang telah direncanakan.

Sedangkan perlawanan sembunyi- sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: 1) tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, 2) bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri, 3) tidak berkonsekuensi revolusioner, dan/ atau 4) lebih akomodatif terhadap sistem dominasi. Oleh karena itu, gejala- gejala kejahatan seperti: pencurian kecil-kecilan, hujatan, makian, bahkan pura-pura patuh (tetapi

---

<sup>21</sup> Sihbudi, Riza dan Moch. Nurhasim, ed., *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas, Jakarta, 2001

dibelakang membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi-sembunyi

Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud atau mengubah sebuah system dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup dalam sistem tersebut sekarang, minggu ini, musim ini (Scott, 1993). Percobaan- percobaan untuk menyedot dengan tekun dapat memukul balik, mendapat keringanan marjinal dalam eksploitasi, dapat menghasilkan negosiasi- negosiasi tentang batas-batas pembagian, dapat mengubah perkembangan, dan dalam peristiwa tertentu dapat menjatuhkan sistem.

Tetapi, menurut Scott (1993), semua itu hanya merupakan akibat- akibat yang mungkin terjadi, sebaliknya, tujuan mereka hampir selalu untuk kesempatan hidup dan ketekunan. Bagaimanapun, kebanyakan dari tindakan ini (oleh kelas- kelas lainnya) akan dilihat sebagai keganasan, penipuan, kelalaian, pencurian, kecongkakan- singkat kata semua bentuk tindakan yang dipikirkan untuk mencemarkan orang- orang yang mengadakan perlawanan. Perlawanan ini dilakukan untuk mempertahankan diri dan rumah tangga. Dapat bertahan hidup sebagai produsen komoditi kecil atau pekerja, mungkin dapat memaksa beberapa orang dari kelompok ini menyelamatkan diri dan mengorbankan anggota lainnya (Scott, 1993).

Scott (2000) menambahkan, bahwa perlawanan jenis ini (sembunyi- sembunyi) tidak begitu dramatis, namun terdapat di mana- mana, melawan efek- efek pembangunan kapitalis asuhan negara. Perlawanan ini bersifat perorangan dan seringkali anonim. Terpencar dalam komunitas- komunitas kecil dan pada umumnya tanpa sarana- sarana kelembagaan untuk bertindak kolektif,

menggunakan sarana perlawanan yang bersifat lokal dan sedikit memerlukan koordinasi (Scott, 2000).

Koordinasi yang dimaksudkan di sini, bukanlah sebuah konsep koordinasi yang dipahami selama ini, yang berasal dari rakitan formal dan birokratis. Tetapi merupakan suatu koordinasi dengan aksi- aksi yang dilakukan dalam komunitas dengan jaringan-jaringan informasi yang padat dan sub kultur - sub kultur perlawanan yang kaya. Tidak terdapat aksi- aksi huru hara, demonstrasi, pembakaran, kejahatan sosial terorganisir, dan kekerasan terbuka. Perlawanan ini akan terus berlangsung selama struktur social masih eksploitatif dan tidak adil (Scott, 2000).

Menurut Basrowi dan Sukidin, studi yang membahas tentang gerakan dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan moral ekonomi. Pada pendekatan ini, aspek pokok yang memicu gerakan adalah: 1) adanya reaksi terhadap perubahan yang dianggap akan mengancam kelangsungan hidup komunitasnya yang berada dalam kondisi subsistensi, 2) faktor kepemimpinan sebagai faktor kunci gerakan dan umumnya berasal dari kalangan elit desa atau patron. Kedua, pendekatan ekonomi politik yang menyatakan bahwa gerakan pada dasarnya didasari oleh pertimbangan rasional individual terhadap perubahan yang dikalkulasikan merugikan dan mengancam mereka. Keputusan melakukan gerakan terletak pada individu yang menganggapnya sebagai pilihan yang efektif dan efisien. Ketiga, pendekatan historis yang memfokuskan pada keberlangsungan kesejahteraan yang terdapat pada suatu masyarakat. Gerakan dipahami sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan dan

ancaman terhadap nilai, norma, tradisi, dan kepercayaan yang dimiliki.<sup>22</sup>

Perlawanan merupakan bentuk dari pernyataan sikap yang dilakukan oleh masyarakat. Penyikapan masyarakat tersebut dalam bentuk perlawanan terhadap kelompok atau pihak yang dianggap mengancam eksistensi mereka selalu mengalami perubahan (Kusuma dan Agustina, ed., 2003). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh isu yang diangkat dan mendapat dukungan dari masyarakat. Soekanto (Kusuma dan Fitria, ed., 2003) berpendapat bahwa selama dasawarsa yang mendahului pemberontakan, kondisi- kondisi sosial dan ekonomi telah menimbulkan tekanan- tekanan dan tuntutan- tuntutan berbeda dari sebelumnya. Kemudian Soekanto menambahkan, tuntutan tersebut disebabkan oleh masalah- masalah yang sifatnya kumulatif dan tidak terungkap yang merupakan sumber frustrasi bagi pemicu timbulnya perlawanan.

Zubir (2002) menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran (seperti buruh, pedagang, petani, dan lain- lain) bersifat sporadis. Dalam memperjuangkan keinginannya, gerakan ini tidak memiliki strategi perjuangan yang jelas sehingga lebih mudah untuk dipadamkan oleh pihak- pihak yang berkuasa. Apabila gerakan ini telah dimasuki oleh unsur ideologis, maka gerakan ini akan menjadi suatu gerakan yang radikal. Dalam percaturan politik, massa dari kelompok ini menjadi lahan perebutan yang subur dari berbagai kelompok yang bertikai. Ia memiliki tujuan yang jelas dan dalam gelombang yang

---

<sup>22</sup> Basrowi dan Sukidin, ed., , *Teori- teori perlawanan dan Kekerasan Kolektif*, Insan Cendikia, Surabaya. 2003



besar, gerakan ini memiliki kecenderungan melawan arus zaman, arus dari status quo yang berkuasa. Gerakan seperti ini biasanya dipelopori oleh mahasiswa sebagai aktor intelektual (Zubir, 2002).

Gurr dalam Mas'ood (1998) menyatakan, bahwa adanya empat faktor yang menentukan intensitas perlawanan dan potensi untuk melakukan tindakan politis sebagai jalan keluar. Pertama, seberapa parah tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif komunal itu dibandingkan dengan kelompok lain. Kedua, kekuatan atau ketegasan identitas kelompok yang merasa terancam. Ketiga, keandalan derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Dan keempat, kontrol represif atau daya paksa tidak adil oleh kelompok-kelompok dominan.

Menurut Alain Touraine seperti yang diikuti oleh Adijtonro (1994) dalam paper yang berjudul "*large dam victims and their defenders: the emergence of an anti- large dam movement in Indonesia*", yang kemudian dikutip oleh Sangaji (2000), terdapat tiga karakteristik gerakan sosial, yakni: identifikasi, oposisi, dan totalitas. Identifikasi berkaitan dengan aktor- aktor gerakan yang dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu para korban (peremajaan pasar) dan para pembelanya. Oposisi berhubungan dengan apa (siapa) yang hendak ditentang. Dan prinsip totalitas berhubungan dengan teori- teori yang mendasari gerakan tersebut.

Berkaitan dengan cara- cara pengungkapan atau ekspresi perlawanan, Sangaji membagi kedalam dua bentuk, yakni: 1) perlawanan yang diungkapkan secara individual, 2) perlawanan yang dilakukan melalui tindakan- tindakan kolektif atau bersama. Kedua bentuk perlawanan tersebut diekspresikan dalam beragam

cara, mulai dari aksi protes terbuka, yang diungkap melalui media massa, surat protes, pengiriman delegasi, atau melalui kesempatan dialog, seminar, hingga cara- cara tertutup, seperti aksi tutup mulut dan tidak menghadiri pertemuan dengan rival.<sup>23</sup>

Di samping itu, perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran ini juga mendapat dukungan dari organisasi atau individu yang umumnya berasal dari kalangan terpelajar, seperti mahasiswa, NGO, tokoh intelektual setempat. Mereka dibedakan atas dua kategori, yaitu: 1) para pendukung spesialis, yakni individu dan organisasi yang secara spesifik membangun keterampilan dan ideologi untuk menentang kebijakan tersebut, 2) para pendukung umum, yakni individu atau organisasi yang menganggap pembelaan tersebut merupakan bagian dari perjuangan menegakkan hak asasi dan keadilan.

Sangaji menambahkan, bahwa alasan dilakukannya perlawanan oleh pelaku perlawanan dibagi atas dua. Pertama, alasan yang berdimensi sosio- kultural, berkaitan dengan tanah leluhur, biasanya alasan ini diungkapkan oleh penduduk asli. Kedua, alasan- alasan yang bersifat sosial- ekonomi, biasanya diungkapkan oleh penduduk pendatang yang telah lama bermukim di tempat tersebut. Menurut A.S. Hikam, terjadinya perlawanan terhadap kekuasaan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, fenomena perlawanan dari sudut pandang otoritas moral sebagai basis hubungan- hubungan sosial dan stabilitas sosial.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sangaji, Arianto, 2000, PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

<sup>24</sup> M.A.S., Hikam, *Perlawanan Sosial: Telaah Teoritis dan Beberapa Studi Kasus*, Prisma, Jakarta. , 1990

## F.2 Islamisasi

Teori Islamisasi dianggap penting untuk memahami dinamika Indonesia kontemporer, khususnya dalam aspek politik, budaya dan perkembangan ideologi keagamaan. Merle C. Ricklefs dalam salah satu karya besarnya *Islamisation and Its opponents in Java* memetakan akar sejarah gerakan Islam di Jawa sepanjang 14 abad. Berdasarkan penelitiannya selama 40 tahun, dia menunjukkan bahwa Islamisasi di Jawa, secara historis merupakan dinamika proses interaksi budaya antara Islam dan Jawa<sup>25</sup>.

Menurut Ricklefs, Islamisasi di Jawa (Indonesia) adalah proses perubahan agama yang terjadi selama beberapa abad. Bahkan, Islamisasi adalah proses yang berlangsung terus hingga kini. Premis ini penting untuk mengkonstruksi arus masif transmisi Islam dari lingkungan asalnya dan merupakan proses yang sangat menentukan dalam sejarah Indonesia. Di mana Islamisasi damai telah berkait-kelindan dengan proses penaklukan dengan peperangan.<sup>26</sup> Untuk kedua proses, damai dan perang, Islam tampil menjadi kekuatan yang paling mengakar dalam religiositas masyarakat dan menjadi agama rakyat.<sup>27</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, istilah Islamisasi justru diseret-serupakan dengan istilah Arabisasi. Hal ini pula yang membuat banyak aspek dari kehidupan kaum muslimin yang dinyatakan dalam simbolisme Arab. Atau dalam bahasa tersebut,

---

<sup>25</sup> Ricklefs, Marle Calvin. "A History of Modern Indonesia since c. 1200". California: Stanford University Press. 2001.

<sup>26</sup> Ricklefs, Marle Calvin. "Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, 2008", hal. 34, 45.

<sup>27</sup> Aqib Suminto, "Islam Indonesia Sepanjang Sejarah", dalam Abdurrahman (Eds.), 70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat, 1993, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, hal. 314. Jacob Sumardjo, "Arkeologi Budaya Indonesia: Pelacakan Hermeneutis-Historis terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia", 2002, Yogyakarta: Kalam, hal. 53-66.

simbolisasi itu bahkan sudah begitu merasuk ke dalam kehidupan bangsa-bangsa muslim, sehingga secara tidak terasa Arabisasi disamakan dengan Islamisasi.<sup>28</sup>

Pada saat yang bersamaan, Islamisasi juga diarahkan pada gagasan dan usaha-usaha pemberlakuan hukum Islam melalui pembentukan Perda (Peraturan Daerah) Syariah di Indonesia.<sup>29</sup> Tak jarang, gagasan ini justru menimbulkan dampak pertentangan di antara sesama pemeluk agama Islam yang disebabkan oleh adanya penafsiran mengenai penafsiran perangkat-perangkat tertentu dari ajaran-ajaran yang ada dalam Islam, terlebih oleh komunitas adat yang merasa akar budayanya terancam.<sup>30</sup>

Di sisi lain, Islamisasi juga dapat dihubungkan dengan ilmu pengetahuan dan teori dakwah, Prof. Herbert J Muller dalam bukunya *The Use of the Past*, menyebut fungsi Ilmu Pengetahuan adalah: “*Scientific standarts of truth are not only possible standarts of course, but they are the necessary standarts for claims to liberal, factual, historical truth*” (Standar ilmiah suatu kebenaran tentunya bukanlah satu-satunya standar, namun standar ini penting untuk mencapai kebenaran yang sesuai dengan pembacaan, kenyataan dan sejarah).<sup>31</sup>

Drs R.B.S. Fudyartanta menyebutkan ada empat fungsi ilmu pengetahuan, yaitu:

1. Fungsi Deskriptif. menggambarkan, melukiskan dan

---

<sup>28</sup> KH Abdurrahman Wahid, “*Arabisasi, Samakah dengan Islamisasi?*”, dalam Islamku, Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, Jakarta, 2006.

<sup>29</sup> Mahmud Al-Anshori, *Penegakkan Syariat Islam Dilemma Keummatan di Indonesia*, Jakarta: 2005, hal. 16.

<sup>30</sup> Achmad Fedyani Saefudin, *Konflik dan Integrasi Perbedaan Fahaman dalam Agama Islam*, Jakarta: 1986, hal. 48.

<sup>31</sup> H. Endang Saifuddin Anshari, MA., Ilmu, Filsafat dan Agama, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1991, hal. 604 .

memaparkan suatu obyek atau masalah sehingga mudah dipelajari dan diteliti;

2. Fungsi Pengembangan: melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan menemukan hasil ilmu pengetahuan yang baru;
3. Fungsi Prediksi: meramalkan kejadian-kejadian yang besar yang mungkin terjadi sehingga manusia dapat mengambil tindakan-tindakan yang perlu dalam usaha menghadapinya;
4. Fungsi Kontrol: berusaha mengendalikan peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki.

Tegasnya: fungsi ilmu pengetahuan ialah untuk kebutuhan hidup manusia di dalam pelbagai bidangnya.

Dilihat dari fungsi ilmu pengetahuan tersebut, maka ilmu dakwah diproyeksikan memiliki empat fungsi tersebut, setidaknya dalam tataran teori. Fungsi deskriptif dakwah dijelaskan mengenai sumber datangnya perintah dakwah, kepada siapa diperintahkan dan meliputi hal apa saja perintah tersebut. Ini adalah hal-hal yang *given*, sudah diajarkan dalam Al-Quran dan Hadits, para Sahabat Nabi dan para Ulama harus menjelaskan, menerangkan atau mendeskripsikan.

Pada fungsi pengembangan, maka dakwah dijelaskan adanya kajian-kajian terdahulu sampai kini dari para ulama yang saling isi mengisi menjadi gugusan pengetahuan yang sangat berharga bagi pengembangan ilmu dakwah. Spektrum dakwah menjadi luas, dan para peneliti punya tugas untuk menambah luasnya spektrum tersebut. Karena dakwah berada pada ruang dan waktu, maka aktualisasi dakwah dihadapkan pada lapangan hidup pada kurun waktu yang berbeda akan menyumbang

gugusan keilmuannya secara terus menerus.

Hal ini selaras dengan teori pembaruan agama menurut Yusuf Qordhowi yang dikatakan sebagai berikut :

“Pembaruan terhadap sesuatu bukan berarti anda menghilangkan dan mendirikan sesuatu yang baru untuk menggantikannya. Ini sama sekali bukan termasuk pembaruan. Pembaruan adalah anda membiarkannya pada inti, identitas dan karakteristiknya tetapi anda memperbaiki yang usang, memperkuat sisi-sisinya yang lemah, sebagaimana ketika anda hendak memperbaiki mesjid bersejarah atau istana bersejarah. Sedapat mungkin anda mempertahankan ciri-ciri khusus, ruh dan materinya, meskipun anda akan memperbaiki warnanya yang sudah kabur, bagian bangunannya yang lapuk, memperbaiki pintu masuknya dan sebagainya

Pembaruan agama harus dari dalam dengan alat-alatnya yang syar'i melalui para penganutnya dan ulamanya, bukan dengan cara merongrongnya, bukan dengan menindas penganutnya, bukan pula dengan memasukkan unsur-unsur asing ke dalamnya dan memaksakannya dengan kekerasan.

Agama ini akan dihiasi dengan ijtihad yang benar dari penganutnya dan pada tempatnya. Ahli ijtihad dalam agama ini jelas diketahui, bukan karena gelar, seragam maupun ijazahnya. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat ilmiah dan moral yang sudah diketahui dalam ilmu ushul fiqih. Para ulama telah menganggap ijtihad sebagai fardhu kifayah yang harus terwujud dalam tataran umat. Bila dalam umat ini tidak ada

jumlah mujtahid yang cukup, keseluruhan umat ini berdosa.<sup>32</sup>

## **F. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di kompleks Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang RT/RW 13/03 atau Blok Segandu Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.

Desa Krimun berjarak kurang lebih 8 kilometer dari pusat Kabupaten Indramayu. Secara administratif Desa Krimun membawahi 4 (empat) rukun tetangga (RT). Berbatasan dengan Desa Losarang, sebelah timur Desa Puntang, sebelah selatan adalah Desa Jangga dan sebelah utara kepulauan Kertasari. Desa Krimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 5065 jiwa dari 1824 kepala keluarga dengan luas wilayah 217,481 ha.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diteliti atau lingkungan sekitarnya.<sup>33</sup> Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa

---

<sup>32</sup> Dr. Yusuf Qordhowi, *Kebudayaan Islam Eksklusif atau Inklusif*, Solo, 2001, h. 97-98

<sup>33</sup> Arief Furchan dan Agus Maimun. *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.27.

metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah serta perkembangannya. Dalam penelitian memiliki beberapa teori pendekatan. Adapun pada penelitian ini setidaknya peneliti menggunakan tiga pendekatan, yaitu :

Pendekatan kesejarahan (*Historical aproach*) : pendekatan ini adalah metode yang urgen pada setiap penelitian yang tiik tolaknya adalah sejarah. Metode ini berpijak pada penelusuran asal mula suatu permasalahan atau pendekatan pada objek penelitian secara menyeluruh melalui catatan-catatan sejarah.<sup>34</sup> Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Huizinga, bahwa sejarah adalah pertanggungjawaban masa silam. Oleh karena itu manusialah yang menentukan arti masa silam itu. Sejarah dalam pengertian sebagai rekonstruksi masa lampau, dalam perkembangannya senantiasa

---

<sup>34</sup>Dalam kajian Islam Pendekatan historis adalah salah satu upaya melakukan studi Islam dengan menumbuhkan perenungan untuk memperoleh hikmah dengan cara mempelajari sejarah nilai-nilai Islam yang berisikan kisah dan perumpamaan. (A. Mukti Ali dalam bukunya yang berjudul *Metode Memahami Agama Islam*)



dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan perdebatan tentang bagaimana sebaiknya menggunakan cara-cara untuk merekonstruksi masa lampau itu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pendekatan biografi: Pendekatan biografi adalah studi tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap *turning point* moment atau epipani yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Peneliti menginterpretasi subjek seperti subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri. Dalam siklus hidup seseorang, dari kelahiran hingga kematian, berbagai kejadian dialami oleh individu. Pengalaman ini merupakan unsur yang sangat menarik untuk diketahui karena ia bersifat akumulatif yang tidak hanya menjelaskan apa saja yang dialami oleh seseorang, tetapi setting di mana kejadian dan pengalaman itu berlangsung. Metode biografi berusaha merekam kembali pengalaman yang terakumulasi tersebut. Biografi karenanya merupakan sejarah individual yang menyangkut berbagai tahap kehidupan dan pengalaman yang dialami dari waktu ke waktu. Biografi ini memiliki banyak varian, antara lain potret, profil, memoir, *life history*, autobiografi, dan diary. varian semacam ini tidak hanya menunjukkan cara di dalam melihat pengalaman yang terakumulasi tersebut, tetapi juga memperlihatkan perluasan dari metode ini sebagai metode yang penting dalam penelitian sosial. Bahan yang digunakan dalam biografi ini adalah dokumen (termasuk surat-surat pribadi) dan hasil wawancara, tidak hanya dengan orang yang bersangkutan, tetapi juga dengan orang yang disekelilingnya.

Dengan cara ini pula individu dapat dikendalikan sekaligus melihat data dari dimensi yang lain karena biografi bagaimanapun juga merupakan bagian dari proses representasi sosial.<sup>35</sup>

Pendekatan Multidimensional (*Multidimensional approach*): yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial untuk menganalisis peristiwa masa lampau. Di Indonesia, multidimensional approach ini dipelopori oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, yang telah merealisasikan gagasan ini dalam disertasinya yang berjudul *The Peasant Revolt of Banten in 1888*. Dalam penelitian ini disamping menggunakan pendekatan sejarah juga peneliti akan menggunakan pendekatan Sosiologi dan Antropologi dalam mencermati kehidupan Sosio-Kultural dan Sosio-Religius masyarakat Cirebon.

Kemudian dalam proses pengumpulan data dengan peneliti menggunakan langkah :

1. *Obeservasi* yaitu : melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap lingkungan Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang
2. *Wawancara*: melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dan catatan sejarah tentang Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang dan proses gerakan Islamisasi di Indramayu.

---

<sup>35</sup> Bungin, B.. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2003). hlm.10.

3. *Dokumentasi*, untuk membekukan hasil penelitian maka dirasa perlu mendokumentasikan semua yang ditemukan melalui media peralatan elektronik.

Kemudian setelah data-data terkumpul dengan baik, selanjutnya melakukan analisa dari temuan-temuan yang didapat. Temuan-temuan tersebut selanjutnya diteliti dengan dua metode analisa, yaitu : Pertama adalah analisis yang dilakukan terhadap data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kedua adalah analisis yang bermaksud untuk memuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang telah dianalisis awal pada tahap pertama. Dari dua proses analisis data ini akan ditemukan satu titik akhir yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini.

## **H. Tinjauan Pustaka**

Belum terdapatnya kajian mengenai resistensi Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang terhadap gerakan Islamisasi di Indramayu menjadi peluang tersendiri terhadap kemanfaatan dari hasil penelitian ini. Meskipun secara profil, rutinitas ritual, serta prinsip ajaran telah banyak dibahas dalam studi akhir strata satu dan makalah-makalah seminar. Sementara mengenai karya tulis terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah:

1. Sartono Kartodirjo dalam buku “Perlawanan Petani Banten 1888”. Buku ini memaparkan tentang pemberontakan kaum tani yang terjadi di Distrik Anyer di Ujung Barat Laut Pulau

Jawa. Meskipun relatif singkat, yaitu dari tanggal 9 sampai tanggal 30 Juli (21 hari), namun Sartono Kartodirdjo berhasil menjelaskan kajian sejarah yang sangat panjang secara detail dan lengkap. Suatu kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh setiap sejarawan.

Menurut Sartono, Pemberontakan Petani Banten pada tahun 1888 merupakan satu di antara rentetan pemberontakan yang terjadi di Banten selama abad 19 dan juga menjadi satu contoh dari ledakan-ledakan sosial yang sedang melanda di seluruh Pulau Jawa saat itu. Secara umum pemberontakan ini terjadi, sebab sejarah Petani Banten seperti sejarah petani di daerah lainnya yang mengalami penindasan, kesengsaraan dan kemiskinan.

Pemberontakan Petani Banten dapat dipandang sebagai satu protes sosial yang dinamis yang memanfaatkan semangat keagamaan dengan unsur-unsur terpenting dari gerakan protes tersebut adalah struktur-struktur organisasi tarekat dan peran pemimpin-pemimpin agama. Nampak jelas sekali dalam gerakan pemberontakan tersebut peran kepemimpinan kiai dan guru tarekat kharismatik yang menempatkan diri mereka sebagai organisator aksi.

Sartono Kartodirdjo menunjukkan hubungan antara orientasi ideologis gerakan pemberontakan Petani Banten pada tahun 1888 dan golongan-golongan sosial dari mana gerakan tersebut memperoleh anggotanya. Tak bisa dipungkiri jika terjadi perpecahan sosial yang tajam dalam masyarakat Banten terkait dengan posisi sosial ekonomi golongan-golongan yang saling bertentangan.

Dalam buku ini juga dijelaskan adanya kekuasaan Belanda yang berdampingan dengan penguasa lokal anti rakyat berlawanan dengan posisi rakyat, khususnya kaum tani. Hal ini menimbulkan suatu situasi politik semakin tidak stabil, yang tercermin dalam pemberontakan-pemberontakan yang terjadi silih berganti.

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah keserupaan semangat perlawanan yang dilakukan oleh Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang terhadap kelemahan MUI Kabupaten Indramayu. Di mana di dalamnya terdapat gerakan protes sosial yang dinamis yang memanfaatkan semangat keagamaan dengan unsur-unsur terpenting dari gerakan protes tersebut adalah struktur-struktur organisasi.

2. Mark R. Woodward –selanjutnya Woodward-, melalui karyanya *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Dalam buku ini, dari berbagai banyak objek kajian yang telah di teliti oleh Woodward mulai dari mengkaji hubungan antara teks-teks keagamaan, agama rakyat, organisasi sosial, wacana sosial, dan keagamaan, ia mengambil kesimpulan, bahwa Islam Jawa pada dasarnya juga Islam, artinya Islam Jawa itu masih tetap dalam koridor dan rel-rel yang telah di tetapkan dalam Islam itu sendiri, dan Islam Jawa bukan Hindu dan Budha, sebagaimana yang di tuduhkan kalangan Islam puritan dan banyaksejarawan-antropolog (kolonial).

Islam Jawa bukanlah penyimpangan dari Islam akan tetapi merupakan varian dari Islam sebgaiman kita

temukan ada Islam India, Islam Syria, Islam Maroko, dan mungkin lebih lanjut mari kita telusuri bersama.

Konsepsi keagamaan dalam studi Woodward merujuk pada konsepsi-konsepsi Islam sebagaimana tercermin dalam literatur keagamaan Islam. Konsepsi-konsepsi Islam tersebut ditransformasi melalui penafsiran orang Jawa dan menghasilkan berbagai bentuk penafsiran baru sebagaimana terekam dalam Babad Tanah Jawi dan sejumlah serat seperti *serat Centini*, *serat Cebolek* maupun *serat Hidayat Jati*.

Pernyataan Woodward tersebut memiliki signifikansi di tengah hasil kajian antropologi yang sebelumnya memotret Islam Jawa sebagai fenomena sinkretik, khususnya pandangan Geertz (1960) yang dalam banyak kesempatan dalam buku Woodward ini direspon secara negatif.<sup>36</sup>

Geertz sebelumnya telah memotret Jawa, melalui sample Mojokuto (Pare), dan menyimpulkan Islam Jawa sebagai sebuah fenomena sinkretik dengan tiga varian keagamaannya, abangan, santri dan priyayi. Pengurutan penyebutan Geertz yang mendahulukan penyebutan dan pembahasan varian abangan, ketimbang santri dan atau priyayi sedari awal mengindikasikan besarnya porsi varian abangan dalam kuantitas dan kualitas Islam Jawa sebagaimana ia temukan di Mojokuto. Dengan demikian dari sudut pandang ini karya Woodward dapat disebut sebagai antitesa pandangan Geertz.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Mark R. Woodward, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Yogyakarta: 2004, hal. 4

<sup>37</sup> Mark R. Woodward, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Yogyakarta: 2004, hal. 4

Terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, maka penulis menganggap bahwa buku Woodward dapat diambil sebagai kacamata untuk memandang Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang terkait hubungannya dengan keagamaan Islam, di mana secara persentuhan sejarah dan prinsip ajaran, komunitas tersebut banyak terinspirasi dari unsur-unsur keIslaman, terutama dalam pemahaman prinsip perilaku hidup bermasyarakat.

3. Erni Budiwanti, dalam karyanya *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Secara luas buku ini mengungkapkan tentang perjalanan masyarakat Islam Sasak yang bernama *Wetu Telu* dalam melakukan perlawanan ideologis dari serangan komunitas *Waktu Lima*, sebuah kelompok Islam Puritan yang berada di Lombok.

*Wetu Telu* merupakan sejenis Islam yang dijalankan dengan tradisi-tradisi lokal dan adat sasak. Varian Islam ini lebih mirip dengan Islam abangan atau Islam Jawa di Jawa, seperti yang ditulis Woodward dalam buku "*Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*". Dalam kepercayaan komunitas *Wetu Telu*, yang paling menonjol dan sentral adalah pengetahuan tentang lokal, tentang adat, bukan pengetahuan tentang sebagai rumusan doktrin yang datang dari Arab. Akan tetapi juga bukan tidak menggunakan Islam sama sekali, dalam doa-doa, tempat peribadatan masjid dan beberapa praktek ibadah lain, merupakan introduksi keislaman mereka.

Penyebutan istilah *Wetu Telu* mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Komunitas *Waktu Lima* menyatakan bahwa

*Wetu Telu* sebagai waktu tiga (tiga: telu) dan mengaitkan makna ini dengan reduksi seluruh ibadah Islam menjadi tiga. Orang Bayan sebagai penganut terbesar Islam *Wetu Telu* ini, menolak penafsiran semacam itu. Pemangku Adatnya mengatakan bahwa, term *wetu* sering dikacaukan dengan waktu. *Wetu* berasal dari kata “*metu*” yang berarti “muncul” atau “datang dari”. Sedangkan “*telu*” artinya “tiga”. Secara simbolis makna ini mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup muncul melalui tiga macam sistem reproduksi, yaitu melahirkan (disebut menganak), bertelur (disebut menteluk) dan berkembang biak dari benih (disebut juga mentiuk). Term *Wetu Telu* juga tidak hanya menunjuk kepada tiga macam sistem reproduksi, tetapi juga menunjuk pada kemahakuasaan Tuhan yang memungkinkan makhluk hidup untuk hidup dan mengembangkan diri melalui mekanisme reproduksi tersebut. Sumber lain menyebutkan bahwa ungkapan *Wetu Telu* berasal dari bahasa Jawa yaitu *Metu Saking Telu* yakni keluar atau bersumber dari tiga hal: Al-Qur'an, Hadis dan Ijma. Artinya, ajaran-ajaran komunitas penganut Islam *Wetu Telu* bersumber dari ketiga sumber tersebut.

Komunitas Islam *WetuTelu* ini dalam perjalanannya mulai terdesak sedikit demi sedikit oleh arus modernitas, ortodoksisme Islam dan “serangan” dakwah terus menerus yang dilakukan oleh Islam *Waktu Lima*, serta implikasi massif dari kebijakan politik terutama proyek transmigrasi lokal ke kawasan adat mereka.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Dr. Erni Budiwanti, “*Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*”, Yogyakarta: 2000, hal. 98 - 136



Sementara hubungannya dengan penelitian yang dilakukan, selain untuk mengamati bagaimana proses perlawanan komunitas adat dalam menghadapi gerakan Islamisasi serupa di atas, juga terdapat kemiripan mengenai bagaimana sebuah komunitas menamakan dirinya lalu diinterpretasikan lain oleh orang luar. Seperti yang juga terjadi di penamaan Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang, di mana penamaan “Dayak” yang tidak bisa dikaitkan dengan nama sebuah suku di pedalaman Kalimantan. Oleh para penganutnya, nama “Dayak” lebih dimaknakan sebagai eksistensi manusia di lingkungan alam semesta. Dayak diambil dari kata *ayak* (nama alat penyaring). Maka, penamaan Dayak berarti merujuk makna orang-orang pilihan, hasil seleksi, saringan atau *ayakan* alam. Hal yang serupa juga berlaku pada pemakaian kata “Hindu” dan “Budha” yang disandang, keduanya tidak diarahkan pada nama-nama agama. Kata “Hindu” oleh masyarakat Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang diartikan sebagai jiwa, diambil dari kata *sewindu*, lama seseorang manusia di dalam kandungan. Sedangkan “Budha” bermakna raga, diambil dari kata “Wuda” (telanjang), keadaan tanpa pakaian dan tidak membawa apa-apa saat dilahirkan<sup>39</sup>. Sementara “Bumi Segandu” adalah nama tempat di mana komunitas tersebut tinggal.

---

<sup>39</sup> Wawancara bersama Takmad Diningrat, pimpinan Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang, 26 April 2015

4. Masykur Wahid, dalam laporan penelitian di jurnal Antropologi Indonesia Edisi 61 Tahun 2000 yang berjudul “*SUNDA WIWITAN BADUY: Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes Banten*” di dalamnya dijelaskan Sunda Wiwitan merupakan pencampuran antara Islam dan Hindu yang dianut oleh masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Banten Selatan. Meskipun umat Sunda Wiwitan tidak memiliki kitab suci, akan tetapi ajaran-ajarannya terjelma dalam tapa, bekerja sehari-hari di ladang. Pemahaman ajaran-ajaran agama itu langsung dipraktikkan di dalam interaksi umat dengan alamnya. Hal ini yang dikatakan oleh James Frezer bahwa agama Sunda Wiwitan mengekspresikan makna-makna simbolik di dalam relasi-relasi sosial budaya dan kosmologi alam Baduy. Keimanannya kepada Allah hanya terlihat di dalam pengucapan kalimat syahadat, namun mereka melakukan praktik ritual keagamaan dengan berpedoman pada *pikukuh*, aturan adat, dan ketaatan kepada buyut, pantangan. Keimanan seperti itu merupakan semangat untuk menjaga hutan, sungai dan gunung hidup harmoni. Seperti, tindakan mereka melaksanakan ritual ibadah pe-muja-an di Sasaka Domas, tanah suci Baduy.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bisa ditelusuri kesamaan pola hidup dan kepercayaan Sunda Wiwitan Baduy dengan Komunitas Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang yang sama-sama memusatkan keyakinan pada keberadaan alam. Komunitas Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang mempercayai bahwa kebaikan hidup dan musnahnya umat

manusia tergantung pada seperti apa sikap yang diberikan dan dipersembahkan terhadap alam.

5. Muhammad Rais, dalam *HEGEMONI ELIT DALAM RITUS AGAMA LOKAL: Studi Keberagamaan Masyarakat Bugis Bone Sulawesi Selatan*. Jurnal Infopub, el-Harakah; Vol 12, No. 2 2010. Dalam tulisannya Rais menjelaskan tentang hegemoni *sanro* dan relasi kuasanya terhadap ritus lokal ini juga terlihat ketika ritual magisnya dapat mengikat masyarakat Ujung, baik yang berdomisili di Desa Ujung sendiri, maupun mereka yang di perantauan. Orang-orang Ujung rela datang ke Ujung hanya untuk sebuah pemenuhan janji yang pernah diikrarkan sebelumnya. Kuatnya dominasi-hegemoni yang dikonstruksi *sanro* juga menjadi sesuatu yang dianggap menarik, sebab *sanro* terkesan selalu mendramatisir praktik ritual ini dalam bingkai agama. Implikasinya, masyarakat lebih mengapresiasi dan memberikan kesempatan banyak kepada *sanro* dalam memandu acara keagamaan dari pada tokoh agama setempat. Dalam penelitian ini ditemukan tiga hal yaitu: Pertama, Praktik dominasi hegemoni *sanro* itu dapat dilihat pada tiga aktivitas keagamaan, yaitu; acara selamat (tasyakuran). Kedua, acara peringatan keagamaan, dan ketiga pada perayaan hari raya besar Islam. Keberhasilan hegemoni *sanro* dalam mengaktualisasikan pemikiran masyarakat diwujudkan dengan kuatnya keyakinan masyarakat Ujung terhadap kesempurnaan acara-acara selamat tersebut baru dianggap sah ketika dilakukan selamat di Addewatang. Bentuk-bentuk dominasi-hegemoni tersebut dapat dilihat pada

proses upacara ritual, bentuk kepercayaan, dan ketergantungan masyarakat Ujung terhadap Putta Sereng, kognisi, dan praktik keagamaan masyarakat Ujung. Kedua, adanya tiga faktor utama terjadinya hegemoni *sanro*, diantaranya; kuatnya legitimasi (aktor) *sanro*, dampak yang ditimbulkan akibat akulturasi ritus lokal tersebut dapat diklasifikasi dalam tiga hal utama yaitu; (1) Tingginya loyalitas masyarakat terhadap sosok *sanro*. Dalam hal ini, *sanro* dianggap sebagai representasi Putta Sereng. Implikasinya *sanro* lebih ditempatkan pada posisi yang tinggi dari pada tokoh agama. (2) Menurunnya tingkat keyakinan agama. Indikatornya adalah kurangnya masyarakat menjalankan pengamalan ibadah, norma-norma agama tidak diindahkan, dan kurangnya kesadaran untuk memahami ajaran agama. (3) Adanya kebingungan teologis pada generasi Ujung sekarang. Persepsi yang terbangun dalam imajinasi mereka bahwa praktik-praktik ritus yang selama ini dilakukan oleh orang tua mereka dianggap sebagai bagian dari perilaku agama.

Adapun keterkaitan dalam penelitian mengenai Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang ini adalah kemiripan pandangan penganut kepercayaan tersebut terhadap Takmad Diningrat sebagai pimpinan komunitas. Hegemoni kuasa dalam *sanro* dituangkan Takmad dalam upayanya mempertahankan komunitas melalui bebera doktrin-doktrin mistis yang mampu mengikat secara kuat keyakinan para pengikutnya.

6. Lukman Solihin, *dalam Kepercayaan Marapu: Telaah atas konsep Tuhan, Nenek Moyang, dan Roh Halus pada*

*Masyarakat Sumba*, Jurnal Infopub, el-Harakah; Vol 12, No. 2 2010. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa *Marapu* merupakan kepercayaan lokal yang bersumber dari pengultusan terhadap arwah nenek moyang. Meskipun dipuja dan disembah sebagai dewa penolong, *marapu* tidak dipersepsi sebagai Tuhan. Tuhan adalah entitas tertinggi yang terletak jauh di atas langit dan tidak dapat dijangkau oleh manusia. Oleh karena itu, perlu perantara untuk menghubungkan antara manusia dan Tuhan, di mana peran tersebut dilakukan oleh *Marapu*. Selain menyembah arwah leluhur, ciri khas lain dari kepercayaan *Marapu* adalah memuja para roh halus yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Baik pemujaan terhadap *marapu* maupun roh halus sebetulnya bermuara pada satu tujuan, yaitu memohon keselamatan atas kehidupan manusia. Kelalaian memuja *Marapu* dan roh halus adalah kelalaian adat yang risikonya dapat membahayakan kehidupan. Kepercayaan terhadap *Marapu* ini kemudian menjadi “peta kognitif” masyarakat Sumba dalam menjalani berbagai aspek kehidupan sosial budayanya. Hal ini dapat disaksikan dari pola permukiman yang dibangun dilengkapi dengan berbagai tempat pemujaan berupa rumah besar (*uma bokulu*), tugu pemujaan (*katoda*), serta makam yang berupa kubur batu. Bentuk rumah tradisional Sumba juga dibuat berdasarkan kosmologi tentang pembagian ruang, yaitu bagian atas untuk tempat tinggal *Marapu*, bagian tengah tempat tinggal manusia, dan bagian bawah untuk kandang hewan. Manifestasi lainnya terlihat dari ritus pengurbanan dan upacara kematian. Ritus pengurbanan adalah upaya masyarakat Sumba membangun komunikasi dengan

*Marapu*. Sedangkan upacara kematian merupakan bentuk nyata dari penghormatan terhadap arwah (jiwa) orang yang meninggal. Arwah orang yang meninggal ini dipercaya akan kembali ke dunia asali mereka, yaitu dunia *Marapu* (*parai marapu*), dengan rute yang sama seperti ketika *Marapu* turun dari langit dan berlayar menuju Pulau Sumba. Konsep kepercayaan terhadap prinsip ketuhanan yang diyakini Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang memiliki kemiripan dengan kajian komunitas adat dalam jurnal tersebut, di mana Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang mempersepsikan bahwa tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan objek penyembahan tanpa terlebih dahulu menyerahkan pengabdian terhadap alam.

7. Clifford Geertz dalam bukunya “Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa”. Melalui buku ini, agama menurut Geertz, bukan saja kepercayaan formal yang jumlahnya menurut sekelompok agama tertentu hanya tiga atau empat saja, Kristen, Yahudi, Islam, atau Shabiun. Dalam bukunya ini, agama memiliki cakupan makna yang lebih luas, yaitu kepercayaan terhadap sesuatu.

Dalam praktiknya, kepercayaan kerap kali mempengaruhi perilaku seseorang bahkan masyarakat luas. Penelusurannya tentang perilaku masyarakat didorong atas kepercayaan tertentu menghasilkan tiga macam golongan masyarakat, Abangan, Santri, Priyayi. Menurutnya, penggolongan kelompok ini dilakukan oleh orang Jawa terhadap diri mereka sendiri.

Dengan berbagai variabel dan dinamika hubungan di antara golongan mereka bukan saja menghasilkan konflik-konflik yang tajam, tetapi integrasi sosial yang saling mengikat dan saling membutuhkan satu sama lain.

Awalnya, timbulnya konflik di antara golongan-golongan di atas penyebabnya hanyalah perbedaan kelas sosial. Kemudian berlanjut ke wilayah agama, hingga berlanjut ke arah pandangan politik.

Dalam pandangan politik, Abangan cenderung kiri dengan ditandai bergabungnya mereka ke barisan partai komunis. Adapun Santri tidak tertarik terhadap pandangan nasionalisme dengan mendirikan partai-partai Islam yang beraliran kanan. Sedangkan golongan yang terakhir, Priyayi, lebih berpandangan nasionalisme dengan kemunculan salah seorang dari mereka menjadi pemimpin PNI pasca revolusi.

Namun, dengan uraian yang sangat sederhana di atas, yang paling penting dalam buku Geertz ini sebenarnya, menurut penulis, adalah agama itu memiliki fungsi ambivalen dalam masyarakat; penguat integrasi sekaligus pemicu konflik. Dari situ banyak orang curiga kalau trikotomi Geertz merupakan desain ilmiah untuk memecah belah integrasi sosial masyarakat Jawa.

Sementara keterkaitan konsep Geertz dengan penelitian ini adalah pemahaman bahwa agama memiliki cakupan makna yang lebih luas, yaitu kepercayaan terhadap sesuatu. Anggapan dan prinsip ini juga diyakini secara mendalam oleh Takmad Diningrat dalam memandang tata laku hidup manusia. Agama

tidak membatasi –tidak menjamin- seseorang berlaku baik dan teratur.

## **I. Sistematika Penulisan**

Teknik penulisan menggunakan Buku Pedoman Akademik Pascasarjana STAINU Jakarta tahun 2012. Sementara sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan pembagian sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya dilakukan penelitian, identifikasi, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II Gambaran Umum Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang**

Setiap hal yang berkaitan dengan gambaran keberadaan Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang, dari mulai lokasi atau wilayah, sejarah, paham dan ajaran, serta gambaran rutinitas ritual yang dilakukan.

### **BAB III Gerakan Islamisasi di Indramayu dan Persentuhannya dengan Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang**

Memuat gambaran umum mengenai gerakan Islamisasi, fenomena munculnya gagasan formalisasi syariat, serta pandangan dan penekanan berbagai kelompok Islam di Indramayu terhadap Komunitas Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang.



#### BAB IV Perlawanan Suku Dayak Terhadap Gerakan Islamisasi di Indramayu

Mengungkap gambaran sikap perlawanan Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang atas tekanan kelompok Islam dan fatwa sesat MUI Kabupaten Indramayu pada tahun 2007. Selain itu, dalam bab ini juga disinggung beberapa pandangan komunitas tersebut tentang sikap keagamaan Islam normatif yang banyak dijumpai di sekelilingnya.

#### BAB V Penutup

Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KOMUNITAS SUKU DAYAK HINDU-BUDHA BUMI SEGANDU LOSARANG**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Losarang**

Kabupaten Indramayu mempunyai visi "Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera" yang disingkat dengan REMAJA. Kondisi wilayah Kabupaten Indramayu sangat diuntungkan secara kata Indramayu berasal dari ekonomis dengan letak geografisnya yang berada dialur utama pantura yang merupakan urat nadi perekonomian nasional dan membentang sepanjang pesisir pantai utara pulau Jawa dengan panjang garis pantai 114 km. Kabupaten Indramayu saat ini memiliki sebanyak 305 buah desa dan 8 kelurahan yang tersebar di 31 Kecamatan. Pada tahun 2008 telah terjadi pemekaran wilayah yang menghasilkan 3 desa baru, yaitu Desa Tambak, Wanantara dan Karanglayung.

Adapun batas wilayah Kabupaten Indramayu adalah: Sebelah Utara: dengan Laut Jawa, Sebelah Selatan: dengan Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon, Sebelah Barat: dengan Kabupaten Subang dan Sebelah Timur dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon. Kabupaten Indramayu memiliki luas wilayah 204.011 Ha atau 2.040.110 Km<sup>2</sup>.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Pada akhir tahun 2007 berdasarkan hasil Pengumpulan data dilakukan melalui Registrasi Penduduk jumlah penduduk Kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 1.717.793 jiwa. Sedangkan pada akhir tahun 2008 angka tersebut telah berubah menjadi 1.732.674 jiwa. Dengan

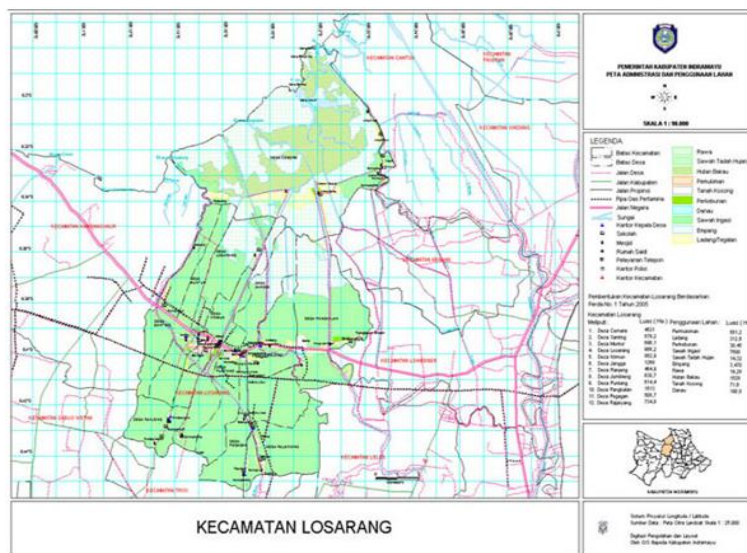
demikian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indramayu tahun 2008 sebesar 0,86%. Pertumbuhan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Lihat Fauziah: 2010).

Sebagai Indikator dari keberhasilan pembangunan manusia disebuah daerah dapat dilihat dari kemajuan di bidang pendidikan. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu pada tahun ajaran 2007/2008 tercatat jumlah SD sebanyak 880 buah, dengan jumlah murid 193.959 orang dan 1.247 orang guru. Kemudian Tingkat SLTP jumlah sekolah tercatat sebanyak 148 buah, dengan jumlah murid 63.301 orang dan 3.385 orang guru. Sedangkan di tingkat SLTA jumlah sekolah sebanyak 52 buah, dengan jumlah murid 16.528 orang dan 1.378 orang guru. Dan untuk Sekolah Kejuruan tercatat sebanyak 45 sekolah, murid 15.645 orang dan guru 1.144 orang. (Kabupaten Indramayu Dalam Angka: 2007, dikutip dari Fauziah: 2010).

Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indramayu, pada bulan Januari 2010 penduduk Indramayu berjumlah 1.711.422 orang dengan komposisi pemeluk agama: Islam 1.703.731 orang, Katolik 2.835 orang, Kristen 4.386 orang, Hindu 160 orang, Buddha 297 orang dan Khonghucu 13 orang, di sini tidak ada data tentang jumlah penganut kepercayaan lokal. Sedangkan jumlah tempat peribadatan untuk umat Islam data pada tahun 2008 tercatat sebanyak 761 buah Masjid, 4229 buah Langgar dan 549 buah Musholla. Sedangkan tempat peribadatan untuk pemeluk agama lainnya berupa Gereja berjumlah 19 buah dan Vihara 2 buah. (Kemenag Kabupaten Indramayu, Data Keagamaan 2010, dikutip dari Fauziah: 2010).

Losarang merupakan salah satu nama kecamatan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Kecamatan Losarang memiliki jumlah penduduk sebanyak 59.128 jiwa yang tersebar di 12 desa<sup>40</sup>, salah satunya Desa Krimun, sebuah wilayah yang menjadi tempat tinggal penganut kepercayaan Dayak Hindu-Budha Segandu Losarang.

Desa Krimun berjarak kurang lebih 8 kilometer dari pusat Kabupaten Indramayu. Secara administratif Desa Krimun membawahi 4 (empat) rukun tetangga (RT). Berbatasan dengan Desa Losarang, sebelah timur Desa Puntang, sebelah selatan adalah Desa Jangga dan sebelah utara kepulauan Kertasari. Desa Krimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 5065 jiwa dari 1824 kepala keluarga dengan luas wilayah 217,481 ha.



Gambar 1. Peta Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu

<sup>40</sup> Profil Kecamatan Losarang, <http://www.indramayukab.go.id>, diakses pada 30 April 2015.

Padepokan dan komunitas Suku Dayak Bumi Segandu terletak di Rukun Tetangga 13 Rukun Warga 03, Blok Tanggul, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Luas Desa Krimun sendiri adalah 654 hektar. Luas wilayah Desa Krimun lebih banyak digunakan untuk persawahan karena mayoritas penduduk masyarakat Desa Krimun adalah petani.

Komunitas Suku Dayak Indramayu berpangkal pada perjalanan hidup seorang tokoh yang bernama Takmad. Takmad dilahirkan pada awal tahun 1943 di Malang Semirang, Lohbener, Indramayu sebagai anak tunggal dari rahim seorang ibu bernama Kariwen dan seorang ayah bernama Sardi. Malang Semirang terletak di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, sebuah desa yang berbatasan dengan tiga kecamatan lainnya yaitu Jatibarang, Sliyeg, dan Indramayu.

## **B. Sejarah dan Perkembangan Kepercayaan Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang**

Sejarah munculnya kepercayaan Hindu-Budha Bumi Segandu tidak terlepas dari sang pemimpin, Takmad Diningrat. Perjalanan hidup Takmad dipenuhi oleh keprihatinan, pada saat usia tiga bulan dalam kandungan ibunya, ayah Takmad meninggal dunia karena sakit. Setelah lahir ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Guna mencukupi kebutuhan hidup mereka, sang ibu bekerja sebagai buruh “nutu” (bahasa Indramayu, menumbuk padi untuk dijadikan beras).

Di usia ke 16, Takmad diajak oleh saudaranya yang berprofesi sebagai nelayan meninggalkan orang tua dan kampung halamannya untuk mencari nafkah di laut. Bersama

kelompoknya, Takmad ikut ke sebuah kapal besar milik orang lain. Beberapa pulau di luar Jawa menjadi tujuannya dalam melakukan pencarian ikan hingga memasuki usia 23 tahun. Takmad mencari di perairan laut Jawa mulai dari Surabaya sampai ke Selat Sunda.

Hidup sebagai nelayan yang sering berlayar mencari ikan di laut melatarbelakangi sisi pengetahuan dan pengalaman Takmad. Pengalaman hidup di laut lepas yang bebas dan bersandar di pelabuhan yang keras inilah yang kemudian mendorong Takmad untuk belajar ilmu beladiri pencak silat.



Gambar 2. Takmad Diningrat, Pemimpin Kepercayaan Dayak Losarang

Pada mulanya, Takmad belajar pencak silat dengan mendalami kebatinan Islam, namun pada praktiknya Takmad enggan melaksanakan syariat Islam, terutama salat lima waktu. Ia berkeyakinan, sekalipun tidak melakukan salat tetapi asal yakin pada kekuatan Allah maka akan berhasil.

Lantaran tidak pernah melakukan salat inilah maka murid-murid yang lain pun sering memojokan dan menganggapnya sebagai orang yang telah menyimpang dan sesat. Akhirnya ia pun mundur dari perguruan dan menyatakan keluar dari agama Islam.

Keluar dari Islam memunculkan pertanyaan-pertanyaan filosofis pada dirinya sendiri, menurut Takmad, ketika seseorang diberikan pertanyaan “Siapa yang menciptakan alam?”, maka kebanyakan orang akan menjawab pertanyaan tersebut dengan kata “Tuhan!”, begitupun jika diberikan pertanyaan “Siapa yang menciptakan manusia?,” lagi-lagi orang akan menjawabnya “Tuhan”, tetapi kemudian, ketika ditanya “siapa Tuhan?,” orang-orang akan menjawab, “Tidak tahu,” mendapat jawaban yang tidak memuaskan ini, lantas Takmad pun melakukan olah pemikiran dengan bertanya mengapa orang harus selalu memulai dari sesuatu yang mereka tidak tahu? Mengapa mereka tidak memulai saja dari apa yang mereka ketahui? Setiap manusia memiliki dirinya sendiri, dan yang pertama kali diketahui adalah bahwa diri mereka ada. Dari pengetahuan tentang diri sendiri inilah kemudian manusia mengetahui tentang adanya yang lain, termasuk tentang alam dan Tuhan.<sup>41</sup>

Takmad mempercayai, eksistensi manusia tidak lepas dari alam, hidup di dan dari alam. Manusia lahir dan berjalan di atas bumi, minum dan makan dari hasil alam. Ketika orang lain hanya diam saat ditanya “Siapa Tuhan?,” maka dirinya telah Takmad membuat kesimpulan dalam ungkapan “Saya tahu, ada

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Takmad Diningrat tanggal 26 April 2015

alam ada saya, ada saya ada Tuhan!”), lantas Takmad mengganti ungkapan “Allahu akbar” dengan ungkapan “Allahu alam”, sebagai seruan dalam seni beladiriinya.

Dengan mengganti seruan dari “Allahu akbar” kepada “Allahu alam” maka Takmad pun menamai dirinya dengan gelar “Nur Alam”. Kemudian gelar tersebut dilengkapi sehingga menjadi “Nur Alam Paheran Takmadiningrat”. “Nur Alam” berarti kehidupan; artinya, ada alam pasti ada kehidupan. Sedangkan “Paheran Takmadiningrat” terdiri dari 3 kata, yaitu “Paheran”, “Takmad”, dan “Ningrat”. “Paheran” berasal dari kata “heran” yang memiliki pengertian bahwa segala pertanyaan, yang bermula dari rasa heran, akan sampai kepada titik buntu dan tak ada lagi jawaban. Di sinilah arti penting Jawa Agama yang menjadi anutan Suku Dayak. “Takmad” adalah nama lahir atau pemberian dari ibu, sedangkan “ningrat” berarti tentang sejarah kerajaan.

Pada tahun 1982, Takmad bersama beberapa orang yang kemudian menjadi muridnya mendirikan kelompok perguruan dengan nama Jaka Utama (JU) dengan ciri khas pakaian serba hitam. Tahun 1986 kelompok tersebut berganti nama dengan Dayak Siswa. Pada masa Dayak Siswa ini Takmad dan murid-muridnya mengenakan pakaian bebas meskipun celana masih tetap berwarna hitam. Namun sejak masa itu Takmad tidak lagi mengajar ilmu beladiri silat.

Pada tahun 2000 kelompok perguruan Dayak Siswa berganti nama lagi menjadi “Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang”. Mulai pada masa ini Takmad dan murid-muridnya yang rata-rata berprofesi buruh dan kuli tersebut



berpakaian khas yakni hanya mengenakan celana kolor berwarna hitam sebelah dan putih sebelah dan memakai topi *contong* (kerucut segitiga) ke mana mereka pergi. Mereka juga mulai mengadakan kegiatan ritual bersama setiap malam Jumat kliwon.



Gambar 3. Peneliti (memakai *contong*) bersama salah satu warga Dayak

Suku Dayak HinduBudha Bumi Segandu Indramayu memiliki pengikut cukup banyak dan terbagi atas tiga kelompok:

Kelompok pertama, dikenal dengan nama Dayak alami, yaitu anggota Suku Dayak tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek sebanyak 100 orang. Dan dalam kehidupan sehari-hari, selain menggunakan pernak-pernik suku mereka, seperti gelang tangan, kalung, ikat celana dari ayaman bambu, di leher mereka lambang Pancasila selalu dikenakan. Menurut Tarsim, salah satu pengikut Dayak Hindu-Budha Bumi

Segandu Losarang, pemakaian lambang Garuda Pancasila merupakan lambang persatuan.

Kelompok kedua, biasa dikenal dengan nama Dayak Preman. Untuk kelompok kedua ini yaitu komunitas suku Dayak yang menggunakan pakaian lengkap dan berwarna warni (sama seperti pakaian orang jaman sekarang pada umumnya), jumlahnya cukup banyak, yaitu 7000 orang dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

Sedangkan kelompok ketiga yaitu Dayak Ibu, hanya beranggotakan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak dan jumlahnya cukup banyak hingga mencapai 10.000 anggota.

Menurut Tarsim, awal berdiri Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu berawal dari perkumpulan perguruan pencak silat yang didirikan kepala suku mereka, Eran Takmad Diningrat Gusti Alam. Keputusan untuk meninggalkan hiruk-pikuk duniawi dan menyebarkan kebaikan dan kesabaran diperoleh Takmad Diningrat setelah menjalani ritual *Topo Bisu* dan *Topo Pepe* yang hingga kini menjadi ritual wajib yang harus dijalani anggota Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang. Awalnya, hanya sang istri dan anak Takmad Diningrat yang menjadi pengikutnya. Namun, lambat laun ajaran yang mengadopsi salah satu tokoh pewayangan Semar ini mampu menarik perhatian masyarakat luas.

### **C. Prinsip Hidup dan Kepercayaan Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang**

Masyarakat Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang menamakan ajaran kepercayaannya dengan

sebutan “Sejarah Alam Ngaji Rasa”. “Sejarah” merupakan sebaris perjalanan hidup (awal, tengah dan akhir) berdasarkan ucapan dan kenyataan. Sementara “alam” ialah ruang lingkup kehidupan alias wadah bagi kehidupan. Sedangkan “Ngaji rasa” adalah tata cara atau pola hidup manusia yang didasari dengan adanya rasa yang sepuas mungkin harus dikaji melalui kajian antara salah dan benar, juga dikaji berdasarkan ucapan dan kenyataan yang bisa menyatu dan agar bisa menghasilkan sari atau nilai-nilai rasa manusiawi, tanpa memandang ciri hidup.

Konsep-konsep ajaran Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang tidak didasarkan pada kitab suci, aliran kepercayaan, agama maupun akar budaya tertentu. Mereka berusaha mencari pemurnian dari dengan mengambil teladan sikap dan perilaku tokoh pewayangan Semar dan Pandawa Lima yang dianggapnya sangat memiliki sikap tanggung jawab terhadap keluarga.

Proses menuju pemurnian diri yang diyakini oleh masyarakat Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang harus melalui beberapa tahap, tahap-tahap tersebut adalah: wedi-sabar-ngadirasa (ngajirasa)-memahami benar-salah.

Setiap tahapan tersebut dapat dipahami melalui penjelasan sebagai berikut, pada mulanya, setiap manusia *wedi-wedian* (takut, penakut) baik terhadap alam maupun lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, manusia harus mengembangkan perasaan sabar dan berserah diri dalam arti berusaha selaras dengan alam tanpa merusaknya. Pada

prinsipnya, Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang sangat melarang kelompoknya untuk merusak lingkungan alam, karena hal ini diyakini akan mendapatkan balasan dari alam. Proses pemahaman tahapan ini juga disebut *ngaji rasa* atau *ngadirasa*. Setelah bersatu dan selaras dengan alam, dalam arti mengenal sifat-sifat alam sehingga bisa hidup dengan tenteram dan tenang karena mendapat lindungan dari Nur Alam (pencipta alam), manusia akan memahami benar-salah dan selanjutnya dengan mudah akan mencapai permurnian diri; manusia tidak lagi memiliki kehendak duniawi. Cerminan dari manusia yang telah memahami benar-salah, tampak dalam kehidupan sehari-harinya. Manusia yang telah mencapai tahap tersebut, akan selalu jujur dan bertanggungjawab.

Prinsip *Ngajirasa* adalah ajaran yang diakui sebagai jalan menuju pemurnian diri, mendidik setiap pengikutnya untuk mengendalikan diri dari tiga “Ta” (harta, tahta dan wanita). Bagi para pengikut Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang yang telah menikah, suami harus sepenuhnya mengabdikan diri pada keluarga. Suami tidak boleh menghardik, memarahi, atau berlaku kasar terhadap anak dan istrinya. Oleh karena itu, perceraian merupakan sesuatu yang dianggap pantang terjadi. Demikian juga, hubungan di luar pernikahan sangat ditentang.

*Ngajirasa* juga mengajarkan untuk saling mengasihi kepada sesama umat manusia. Misalnya, menolong orang yang sedang kesulitan walaupun berbeda kepercayaan, tidak menagih hutang kepada orang yang diberi pinjaman. Yang terbaik adalah

membiarkan orang yang berhutang tersebut untuk membayar atas kesadarannya sendiri. Demikian juga dalam hal mendidik anak, sebaiknya tidak terlalu banyak ngatur karena yang bisa mengubah sikap dan perilaku adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jalan menuju pemurnian diri juga ditunjukkan dengan hidup yang sederhana, menjauhi keinginan mengejar kesenangan duniawi, menghilangkan perasaan dendam, penasaran dan iri kepada orang lain.

Konsepsi tentang alam tampak dari keyakinan bahwa dunia berasal dari bumi segandu (bumi yang masih bulat) bernama Indramayu. Bumi segandu, kemudian menimbulkan lahar menjadi daratan dan air. Setelah itu muncul alam gaib, yang mengendalikan semua itu adalah Nur Alam.

#### **D. Ritual Kepercayaan Masyarakat Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang**

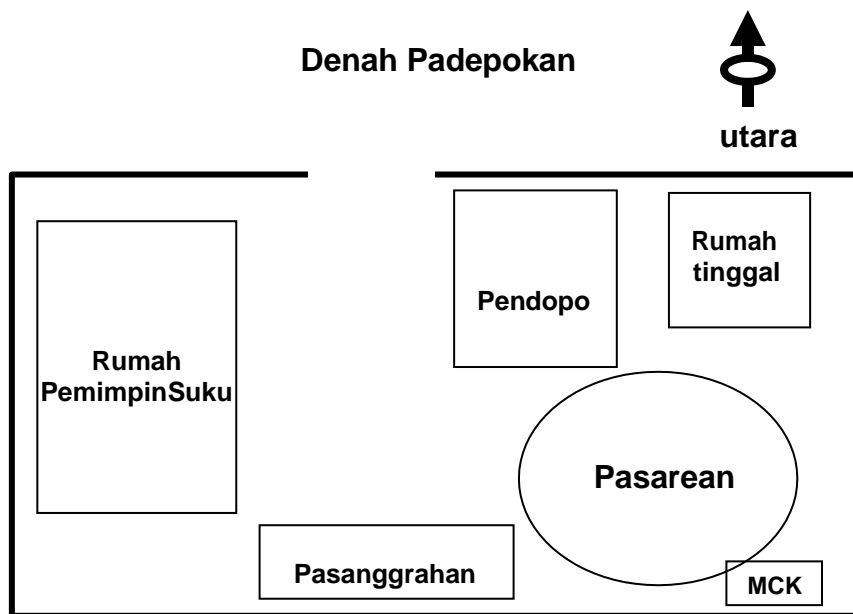
Ritual kepercayaan yang dijalankan oleh masyarakat Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu dilakukan pada setiap malam Jum'at kliwon, bertempat di pendopo Nyi Ratu kembang. Beberapa puluh orang laki-laki bertelanjang dada dan bercelana putih hitam duduk mengelilingi sebuah kolam kecil di dalam pendopo. Sementara itu, kaum perempuan duduk berselonjor di luar pendopo.



Gambar 4. Pendopo Nyi Ratu Kembang

Secara praktik, proses ritual diawali dengan melantunkan Kidung Alas Turi dan Pujian Alam secara bersama-sama. Salah satu penggalan Kidung Alas Turi dan Pujian Alam adalah sebagai berikut:

*Ana kita ana sira, wijile kita cukule sira, jumlae ana pira, ana lima, anane ning awake sira. Rohbana ya rohbana 2x, robahna batin kita. Ning dunya sabarana, benerana, jujurana, nerimana, uripana, warasana, cukulana, openanana, bagusana* (ada (pada) saya ada (pada) kamu, lahirnya aku tumbuhnya kamu, jumlahnya ada berapa, jumlahnya ada lima. Adanya di badan kita, Rohbana ya rohbana 2x, rubahnya batin kita. Di dunia sabar, benar, jujur, nerima, hidup, sembuh (sadar), tumbuh, dirawat, (supaya) bagus).



Usai melantunkan Kidung dan Pujian Alam, pemimpin kelompok, Takmad Diningrat, membeberkan cerita pewayangan tentang kisah Pandawa Lima dan guru spiritual mereka, Semar. Usai pemaparan wayang, Takmad memberikan petuah-petuah kepada para pengikutnya. Proses pemaaran kisah melalui wayang dan petuah ini berlangsung hingga tengah malam. Setelah itu, para pengikut laki-laki menuju ke sungai yang terletak di belakang benteng padepokan. Di sungai dangkal itu mereka berendam dalam posisi terlentang, yang muncul hanya bagian mukanya saja. Mereka berendam hingga matahari terbit. Ritual berendam ini disebut *kungkum*.

Proses ritual dilanjutkan di keesokan harinya, di saat sinar matahari sedang terik, mereka berjemur diri, yang berlangsung mulai sekitar jam 9 pagi hingga tengah hari. Ritual ini disebut *pepe*.



Gambar 5. *Pepe* atau ritual berjemur

Di sisi lain, *medar* (menceritakan) kisah pewayangan, *kungkum* (berendam), *pepe* (berjemur) dan melantunkan Kidung dan Pujian Alam adalah kegiatan ritual yang boleh dilakukan setiap hari. Namun kegiatan ritual dilakukan secara massal hanya pada setiap malam Jumat kliwon.

Ritual-ritual tersebut menurut masyarakat Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang pada dasarnya adalah sebagai upaya menyatukan diri dengan alam, serta cara mereka melatih kesabaran. Semua ini dilakukan tanpa ada paksaan.



#### **E. Adaptasi Prinsip Keislaman dalam Ajaran Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang**

Sebagai sebuah komunitas kepercayaan yang lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam, sekaligus anggapan bahwa keberadaannya merupakan sebagai hasil dari respon ketidak-puasan terhadap perilaku penyimpangan prinsip keagamaan masyarakat Islam, maka terdapat beberapa prinsip dan ritual dari Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang yang mereka anggap sebagai bagian dari *saripati* kebaikan yang selama ini diabaikan padahal tidak lepas dari substansi ajaran Islam.

##### **a. Perumusan Sumber Penulisan Sejarah**

Sebagai sebuah komunitas kepercayaan, Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang termasuk salah satu komunitas yang memiliki tradisi penulisan cukup baik. Hal ini bisa direkam secara kasar dari pola pencatatan yang dilakukan secara terus menerus oleh para penghayatnya dari sumber lisan tunggal pemimpin komunitas Takmad Diningrat. Pencatatan yang dilakukan secara berkesinambungan tersebut dituangkan dalam masing-masing buku guna terus dipelajari dan didalami sebagai acuan hidup bagi para pemeluknya. Sebagian besar yang terekam dalam catatan penganut Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang berbentuk nasihat normatif mengenai sikap hidup, di sisi lain, kandungan terbesar kedua ialah mengenai proses sejarah terbentuknya komunitas itu sendiri yang dimulai dari perjalanan hidup Takmad Diningrat sebagai peletak fondasi Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang.

Sebagaimana agama-agama yang kerap memiliki sentuhan dan keterpengaruhan terhadap agama sebelumnya, Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang dalam segi pencatatan sejarah mengandung unsur-unsur yang dimiliki oleh Islam sebagai agama mayoritas di lingkungan masyarakat sekitarnya.

- Proses Pencarian Kebenaran

Kelahiran sebuah agama dan kepercayaan kerap diawali oleh kegelisahan seseorang terhadap pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada “kebenaran”. Hal itu diawali dengan sebuah goncangan terkait realita yang menurutnya bertolak belakang dengan prinsip dan pengertian yang sesuai dengan apa yang dipahaminya. Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang sebagai sebuah kepercayaan kebatinan diawali oleh kegelisahan Takmad dalam mencari sebuah kebenaran tentang makna Tuhan sebagai pencipta, pertanyaan-pertanyaan filosofis pada diri Takmad muncul melalui sebuah realita ketika seseorang diberikan pertanyaan “Siapa yang menciptakan alam?”, maka kebanyakan orang akan menjawab pertanyaan tersebut dengan kata “Tuhan!”, begitupun jika diberikan pertanyaan “Siapa yang menciptakan manusia?,” lagi-lagi orang akan menjawabnya “Tuhan”, tetapi kemudian, ketika ditanya “siapa Tuhan?”, orang-orang akan menjawab, “Tidak tahu,” mendapat jawaban yang tidak memuaskan ini, lantas Takmad pun melakukan olah pemikiran dengan bertanya mengapa orang harus selalu memulai dari sesuatu yang mereka tidak tahu? Mengapa mereka tidak memulai saja dari apa yang mereka ketahui? Setiap manusia memiliki dirinya sendiri, dan yang pertama kali diketahui adalah bahwa

diri mereka ada. Dari pengetahuan tentang diri sendiri inilah kemudian manusia mengetahui tentang adanya yang lain, termasuk tentang alam dan Tuhan<sup>42</sup>. Takmad Diningrat melalui segenap proses pencrarian tersebut ritual *Topo Bisu* dan *Topo Pepe* yang hingga kini menjadi ritual wajib yang harus dijalani anggota Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang.

Dalam konteks ini, Rahmat Subagyo (2005), mengatakan seluruh kebatinan bergerak di bawah tanda protes dan kritik terhadap zaman sekarang. Perjalanan Islam sendiri tidak bisa dipungkiri mengalami pergeseran ke arah formalitas serba-lahir yang menimbulkan reaksi batin.<sup>43</sup>

Sejalan dengan Rahmat, Selo Soemardjan mengemukakan bahwa apabila terjadi kegoncangan-kegoncangan yang luas dan lama di dalam kehidupan masyarakat, ilmu kebatinan dirasakan sekali keperluannya. Karena itu, timbulnya banyak aliran kebatinan itu terjadi ketika masyarakat mengalami kegoncangan.

Kegelisahan Takmad hampir sepenuhnya merujuk pada peristiwa wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad SAW sebagai penokohan sentral dalam agama Islam. Muhammad melakukan semedi di Gua Hira dalam proses pencarian kebenaran yang berujung pada penerimaan nama Tuhan sebagai pusat kebenaran.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Takmad Diningrat tanggal 26 April 2015

<sup>43</sup> Rahmat Subagyo dalam Suwarno Imam, *Konsep Tuhan, Manusia dan Msitik dalam Berbagai Kebatinan Jawa karya*, (Jakarta: Rajagrafindo Pertama, 2005), hal. 78.

<sup>44</sup> Q.S Al-‘Alaq 1-5

- Adopsi Sejarah Kenabian

Meskipun tidak sampai mengakui status kenabian pada dirinya, Takmad Diningrat menyebut nama-nama nabi yang terdapat dalam kepercayaan umat Islam sebagai tokoh-tokoh yang secara tidak langsung menjadi tonggak ajaran Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang. Dalam catatan berjudul “Sejarah Jawa Nabi 25”, Takmad Diningrat menyebut Nabi Muhammad sebagai nabi yang diturunkan di Jawa.

*Jare Kanjeng Nabi Muhamad Ngalaihi Wasallam “Lamun takon sejarah nabi 25 mung hanya kari loro, 1. Sing masih Kanjeng Nabi Sulaeman, 2. Sing masih Kanjeng Nabi Muhamad Ngalaihi Wasallam.*

*Alif arep takon maning. “Sing loro anane ning endi?, jare Kanjeng Nabi Muhamad Ngalaihi Wasallam anane ning Jawa bari Agama. Kanjeng Nabi Muhamad Ngalaihi Wassalam anane ning Jawa, Kanjeng Nabi Sulaeman anane ning agama.*

(Kata Nabi Muhammad, “Kalau bertanya sejarah nabi 25 hanya tinggal dua. 1. Yang masih Nabi Sulaeman. 2. Yang masih Nabi Muhammad. Alif bertanya kembali, “Yang dua ada di mana?,” kata Nabi Muhammad mereka berada di Jawa dan Agama. Nabi Muhammad berada di Jawa, Nabi Sulaeman berada di Agama).

- Praktik Ritual

Sebagaimana sebuah agama dan kepercayaan, Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu memiliki segenap perangkat

praktik ritual yang dijalankan oleh masyarakat di dalamnya. Praktik ritual yang dilakoni oleh para penganut Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang tersebut merupakan penerapan dari pesan totalitas penghambaan sebagaimana yang dipesankan Takmad Diningrat.

Proses ritual dimulai dengan membacakan Kidung Pujian Alam atau Kidung Alas Turi, dilanjutkan ritual *medar* (menceritakan) kisah pewayangan, *kungkum* (berendam), *pepe* (berjemur).

Kidung Pujian Alam alias Kidung Alas Turi merupakan mantera yang secara rutin dalam keseharian para penganut Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang. Kidung ini dilantunkan secara massal di setiap malam Jumat Kliwon. Salah satu penggalan Kidung Alas Turi yang memiliki kemiripan dengan salah satu ayat Al-Quran yang dijadikan pujian dalam keseharian Muslim adalah sebagai berikut;

*Ana kita ana sira, wijile kita cukule sira, jumlae ana pira, ana lima, anane ning awake sira. Rohbana ya rohmana 2x, robahna batin kita. Ning dunya sabarana, benerana, jujurana, nerimana, uripana, warasana, cukulana, openanana, bagusana*

(ada (pada) saya, ada (pada) kamu, lahirnya aku tumbuhnya kamu, jumlahnya ada berapa, jumlahnya ada lima. Adanya di badan kita, Rohbana ya rohmana 2x, rubahnya batin kita. Di dunia sabar, benar, jujur, nerima, hidup, sembuh (sadar), tumbuh, dirawat, (supaya) bagus).

Pada bagian ini, Kidung Alas Turi yang dijadikan sebagai mantra pokok dalam ritual kepercayaan masyarakat Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Losarang memiliki kemiripan dengan lafaz *Rabbana Zalamna Anfusana Wa In Lam Taghfirlana Watarkhamna Lanakunanna Minal Khasirin*.<sup>45</sup>

b. Pemakaian Simbol dan Pemaknaannya

- Pengucapan Lafaz Allah

Kelompok Kepercayaan Dayak Hindu Budha mempercayai bahwa eksistensi Tuhan yang sebenarnya adalah alam semesta. Selain pada keyakinan, hal ini tampak pada setiap ritual yang dijalankan dengan pesan untuk memberi penghormatan secara khusus kepada alam serta melalui pemahaman sikap hidup yang bersandar kepada alam.

Eksistensi ketuhanan yang digeser pada keberadaan alam semesta ini juga diwujudkan dalam penyebutan nama “alam” setelah lafaz Allah, penyebutan Tuhan bagi umat Islam. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penyetaraan bahkan penyatuan antara alam semesta dengan predikat ketuhanan sebagai penguasa.

Penyatuan nama Allah dengan alam bermula sejak Takmad mempercayai bahwa eksistensi manusia tidak lepas dari alam, hidup di- dan dari alam. Manusia lahir dan berjalan di atas bumi, minum dan makan dari hasil alam. Ketika orang lain hanya diam saat ditanya “Siapa Tuhan?”, maka dirinya telah Takmad membuat kesimpulan dalam ungkapan “Saya tahu, ada

---

<sup>45</sup> Q.S. Al-A'raf: 23

alam ada saya, ada saya ada Tuhan!”, lantas Takmad mengganti ungkapan “Allahu akbar” dengan ungkapan “Allahu alam”, sebagai seruan dalam seni beladiriya<sup>46</sup>.

- Pemakaian Prinsip Lima Rukun Islam

Sebagaimana masyarakat Muslim mempercayai bahwa rukun Islam menjadi dasar keagamaan yang mesti dijalankan bagi setiap pemeluknya, Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang juga memunculkan lima rukun dan dasar dari semangat kepercayaan masyarakatnya.

Namun 5 dasar kepercayaan Dayak Hindu Budha-Segandu Losarang jauh berbeda dengan kelima rukun Islam yang diakui oleh setiap muslim. Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang meyakini lima prinsip yang tercatat dalam naskah berjudul “*Garis Besar sing Jumlae Ana Lima*” (Garis Besar yang Jumlahnya Ada Lima), yakni dalam penggalan berikut:

*Min lah ana ana menusa lan ana menusa lan menusa lan kuasa lan kuasa ana ning sira. Lan wayae sira lan wayae sira bukaen lan atine sira. Lan ana wijile ana lima.*

(*Min lah* ada manusia dan ada manusia dan ada manusia dan ada kuasa dan ada kuasa ada di hatimu. Dan saatnya kamu dan saatnya kamu membuka hatimu. Dan butirnya ada lima).

Maksud dari bait tersebut, menurut Takmad Diningrat adalah bahwa landasan kepercayaan Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang memiliki 5 butir garis besar sebagaimana rukun Islam yang dipercayai oleh umat muslim. Akan tetapi

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Takmad Diningrat tanggal 26 April 2015

tidak berbentuk dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, melainkan kekuatan diri sendiri sebagai manusia. Yakni, 1. Manusia sebagai Manusia, 2. Manusia yang Berhadapan dengan Kekuasaan, 3. Mengetahui Kekuasaan Manusia 4. Menguasai Diri Sendiri, 4. Membuka Hati.



### **BAB III**

## **GERAKAN ISLAMISASI DI INDRAMAYU DAN PERSENTUHANNYA DENGAN KOMUNITAS SUKU DAYAK HINDU-BUDHA BUMI SEGANDU LOSARANG**

#### **A. Gerakan Islamisasi dan Perundang-undangan Hukum Islam di Indramayu**

Dalam pandangan status keagamaan formal, sebagian besar masyarakat Indramayu menganut agama Islam, hal ini juga turut dibuktikan dari sarana dan prasarana keagamaan yang begitu banyak, hampir di setiap Rukun Tetangga (RT) di kabupaten ini memiliki sarana peribadatan umat Islam yang cukup memadai jika dibandingkan dengan daerah atau kabupaten di sekitar Jawa Barat. Selain itu, secara regenerasi pendidikan keagamaan, masyarakat Indramayu masih tercatat sebagai daerah terbesar yang menyalurkan lulusan Sekolah Dasar (SD) untuk melanjutkan ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jawa Barat bahkan ada juga yang di daerah Indramayu sendiri.<sup>47</sup>

Besarnya prosentase masyarakat pemeluk Islam di Indramayu pada akhirnya mendorong lahirnya gagasan dan usaha-usaha pemberlakuan hukum Islam melalui pembentukan Perda (Peraturan Daerah) Syariah di Indonesia.<sup>48</sup>

Di sisi lain, maraknya semangat formalisasi syariah merupakan bagian dari fenomena politik pasca Orde Baru, di mana pandangan umum masyarakat diwarnai dengan *euforia*

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Selamat Edi, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, 30 April 2015

<sup>48</sup> Mahmud Al-Anshori, *Penegakkan Syariat Islam Dilemma Keummatan di Indonesia*, Jakarta: 2005, hal. 16

demokrasi atau liberalisasi politik. Iklim politik Islam diekspresikan lebih formal (*Scriptual*), tampak dalam berbagai sumber politik yang diterima sebagai pemikiran masyarakat, organisasi, media dan akses politik.

Terbukti di Indramayu, secara *scriptual* semangat Islamisasi ditunjukkan dengan gagasan visi misi Pemerintah Kabupaten Indramayu yaitu mewujudkan masyarakat Indramayu yang “religius, maju, mandiri dan sejahtera” yang disingkat “INDRAMAYU REMAJA”. Secara kebahasaan, visi berarti kemampuan daya lihat dan pemahaman terhadap inti persoalan tertentu atau masalah pokok tertentu serta menangkap tujuan masalah tersebut hingga mencapai tujuan tertentu.<sup>49</sup>

Dalam kaitannya dengan organisasi atau lembaga apapun yang dibentuk, visi dapat didefinisikan “*sebagai suatu pemikiran atau pemahaman kedepan terhadap organisasi atau lembaga yang dibentuk/didirikan dalam rangka mewujudkan tujuan utama yang melatarbelakangi berdirinya suatu organisasi atau lembaga*”.<sup>50</sup> Kata “religius” merupakan slogan yang sering digunakan di beberapa daerah dengan tidak meninggalkan *Islamic Value*.<sup>51</sup>

Adapun modal sosial untuk merealisasikan cita-cita kolektif berupa populasi pengikut keagamaan yang besar dibandingkan pemeluk agama lain. Kabupaten Indramayu dengan mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam. Pada tahun 2006 penduduk yang beragama Islam tercatat sebanyak

---

<sup>49</sup> W.J.S Purwadarwita, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta, 1987, hal. 1142.

<sup>50</sup> A.S Arifin, *Melihat Kembali Visi Misi Pemkab Indramayu* dari <http://denpatrol.com> diakses pada 30 Maret 2015.

<sup>51</sup> Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, terj. Harimurti dan Qomaruddin SF, Jakarta, 2003, hal.42-61.

1.686.244 jiwa, sedangkan sisanya tersebar pada empat agama lain seperti Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu hanya 23 jiwa.

Jumlah tempat peribadatan umat Islam di tahun 2006 tercatat sebanyak 804 Masjid, 3.734 Langgar dan 279 Mushola. Tempat peribadatan lainnya tercatat sebanyak 17 Gereja Protestan, 10 Gereja Katolik dan 2 Vihara. Pondok Pesantren yang ada di Indramayu tersebar hampir di seluruh Kecamatan kecuali di Kecamatan Pasekan. Pada tahun 2006 tercatat sebanyak 120 Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Indramayu dengan jumlah santri sebanyak 36.010 orang. Terlihat dari data diatas ada pengurangan jumlah gereja kristen dari tahun 2007 sampai tahun 2008.

Teori modernisasi mengklaim bahwa agama merupakan fenomena masyarakat tradisional yang cenderung akan kehilangan peran seiring dengan berkembangnya masyarakat industri modern. Akar-akar agama dipandang hanya terdapat di pedesaan dalam masyarakat kelas sosial bawah. Kecenderungan perilaku keagamaan sering kali dihubungkan dengan kelas-kelas sosial. Contohnya NU berasal dari desa dan kelas sosial bawah, sedangkan kelompok modernis seperti Muhammadiyah adalah orang-orang kota dan kelas sosial menengah.<sup>52</sup>

Pengaruh Islam terhadap politik berpengaruh negatif apabila dikontraskan dengan unsur-unsur utama demokrasi. Klaim tersebut berarti juga Islam memiliki hubungan negatif dengan

---

<sup>52</sup> Sebagaimana dikutip dari Clifford Geertz dalam Saiful Mujani, *Muslim Demokrat...*, h.110.

dukungan terhadap nilai-nilai demokrasi. Kegagalan demokrasi di Indonesia dalam regim otoritarian Orde Baru menjelaskan bahwa lemahnya atau tidak adanya administrator yang kompeten, mentalitas yang berorientasi pada pemecahan masalah di antara elit politik Indonesia ketika itu. Otoritarianisme tersebut berakar pada budaya politik Jawa yang tidak mengenal demokrasi. Dengan diterapkannya konsep muslim santri, abangan dan priyayi oleh Clifford Geertz.<sup>53</sup>

Keberhasilan politisasi produk hukum juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tentang kepentingan diri mereka serta informasi yang mengawal jalannya pembuatan peraturan daerah. Banyaknya kasus perdata yang melewati mekanisme yudisial di pengadilan memberikan suatu indikasi bahwa masyarakat Indramayu relatif berkembang terhadap permasalahan hukum, padahal kebanyakan daerah di Indonesia menghindari penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Dari sisi kepercayaan institusi hukum, hal tersebut juga mengindikasikan membaiknya problematika kelembagaan hukum yang pada tahun 2006-2007 sangat menurun kepercayaan publik terhadap institusi ini.

Adapun kebijakan pemerintah daerah Indramayu dalam bidang sosial keagamaan adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Perda No. 7 Tahun 1999 dan perubahannya No. 4 tahun 2001 tentang prostitusi

---

<sup>53</sup> Saiful Mujani, *Muslim Demokrat...*, h.26-30.

<sup>54</sup> Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indramayu Bidang Keagamaan dan Hukum, Bagian Kesra dan Hukum Setda Kabupaten Indramayu. Lihat juga dalam Mulih Harja, *Kebijakan Keagamaan di Kabupaten Indramayu*, Jendela Informasi Wong Dermayu, edisi 15 Agustus – 15 September 2004

2. Perda No 2 Tahun 2003 tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
3. Perda No. 30 tahun 2001 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman keras revisi perda No.7 tahun 2005
4. Surat Edaran Membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum beraktifitas
5. Surat Edaran Mengumandangkan adzan secara serentak tepat waktu pada setiap waktu sholat dan mendirikan shalat berjamaah di masjid, musholla, langgar yang ada di lingkungan kantor, dinas, instansi, sekolah, madrasah, perusahaan dan masyarakat
6. Surat Edaran menghentikan atau menutup aktifitas perkantoran selama 20 menit yaitu 10 menit sebelum dan sesudah sholat fardlu
7. Surat Edaran berpakaian baju takwa atau busana muslim (jilbab) pada setiap hari Jumat bagi pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indramayu
8. Surat Edaran membiasakan puasa Senin-Kamis
9. Surat Edaran membiasakan mengeluarkan zakat, infaq, shodaqoh melalui BAZ untuk kepentingan umat manusia

Secara umum, peraturan-peraturan daerah tersebut tidak mencantumkan secara jelas istilah syariat Islam, sehingga lebih tepat dikatakan sebagai peraturan-peraturan sosial keagamaan yang berhubungan dengan penertiban kehidupan publik. Namun fakta dilapangan politisi lokal membenarkan adanya upaya Islamisasi, namun tidak melalui aspirasi kelompok masyarakat tertentu untuk menerapkan syariat Islam, tetapi lebih kepada kebijakan *top down* eksekutif untuk kepentingan pencitraan. Selain itu juga adanya

keterbatasan legislator di daerah terhadap pengetahuan ke-Islaman yang mereka miliki.<sup>55</sup>

Fungsi Peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1974 pasal 39, dan juga merupakan fungsi delegasian dari Keputusan Presiden. Fungsi Peraturan daerah ini dirumuskan secara negatif oleh pasal 39 Undang-Undang No.5 Tahun 1974 sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat).
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Ketentuan ini merupakan syarat bagi pembentukan Peraturan Daerah Tingkat II
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini suatu peraturan daerah tingkat I itu boleh mengatur masalah-masalah yang belum diatur oleh peraturan-peraturan ditingkat pusat saja, tetapi bagi Peraturan Daerah Tingkat II hal-hal yang boleh diatur

---

<sup>55</sup> Arskal Salim, *Peraturan Daerah Berbasis Syariat...*, h.

<sup>56</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius 1998), h.121

bukan saja masalah-masalah yang belum diatur oleh peraturan ditingkat pusat, tetapi juga hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan Daerah Tingkat I dan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

5. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan Daerah yang lebih Tinggi. Ketentuan ini diperuntukkan bagi Peraturan Daerah Tingkat II.
6. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur rumah tangga daerah bawahannya. Ketentuan ini diperuntukkan bagi Peraturan Daerah Tingkat I dalam hal ini Peraturan Daerah Tingkat I tidak boleh mengatur masalah-masalah yang sebenarnya merupakan kewenangan daerah Tingkat II

Fungsi Keputusan Kepala daerah adalah menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan atau tugas Pemerintahan. Keputusan Kepala Daerah dalam hal ini merupakan fungsi delegasi dari Peraturan Daerahnya, atau dari suatu Keputusan Presiden, dan Berdasarkan UU No 10 Tahun 2004.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Tata Urut Perundang-Undangan Dan Problema Peraturan Daerah*, [http://www.legalitas.org.id//Artikel HTN/tataurutanperUUan\(Jimly\).htm](http://www.legalitas.org.id//Artikel%20HTN/tataurutanperUUan(Jimly).htm) diakses pada 30 April 2015

## **B. Gerakan Islamisasi dan Fatwa Sesat MUI Kabupaten Indramayu terhadap Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang**

Di Indonesia pelaksanaan hukum (fiqh) Islam diwakili oleh beberapa institusi. Majelis ulama Indonesia (MUI) lebih dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa. Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas melakukan pencatatan perkawinan dan wakaf, Peradilan Agama bertugas menangani masalah hukum *al-ahwal al-syakhshiyyat* (hukum keluarga Muslim) yang terjadi di masyarakat. Produk peradilan adalah ketetapan (*isbat*) dan keputusan yang dalam fiqh disebut *al-qadla'*. Di samping itu ormas-ormas seperti Muhammadiyah, Nahdlotul Ulama (NU), Persatuan Islam (PERSIS), dan yang lainnya memiliki institusi yang bertugas untuk mendalami dan merekomendasikan pendapat (bahkan sikap) organisasi terhadap persoalan (hukum) yang terkadi di masyarakat.

Kajian mengenai fatwa MUI telah dilakukan oleh sejumlah cendekiawan muslim Indonesia. M. Atho' Muhdlor dan Ahmad Fathonih telah melakukan penelitian mengenai fatwa MUI. Antara dua penelitian tersebut terdapat sedikit perbedaan. Penelitian Atho' Muhdhhor dilakukan terhadap fatwa yang dihasilkan antara tahun 1975-1988. Sedangkan Ahmad Fahonih lebih mengutamakan metode *istinbath* hukumnya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Muhammad Atho' Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia : Sebuah Study Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988*:INIS, 1993



Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam surat keputusan MUI nomor U-596/MUI/X/1997. dalam surat keputusan tersebut, terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa, dan teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.

Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam pasal 2 (1 dan 2). Pada ayat 1 dikatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam ayat berikutnya (ayat 2) dijelaskan bahwa dasar- dasar fatwa adalah al-qur'an, hadits, ijma', qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya.

Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan langkah-langkah berikut: *pertama*, setiap masalah yang diajukan MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya; *kedua* dalam rapat komisi, dihadirkan ahli berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk mendengarkan pendapatnya untuk dipertimbangkan.

*Ketiga*, setelah pendapat ahli didengar dan dipertimbangkan, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para ulama imam madzhab dan fuqaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara *istidlal*-nya dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat-pendapat ulama seragam atau hanya satu ulama

---

Dan Ahmad Fathoni, “*Konsistensi Metode Istinbath Al-Ahkam Ftawa Majlis Ulama Indonesia Jawa Barat Tentang Sertifikasi Halal*”, Bandung: PPs IAIN SGD, 2001, tesis, td

yang memiliki pendapat, komisi dapat menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa.

Sampai saat ini masih belum ditemukan sebuah produk hukum Indonesia yang di dalamnya memberikan peluang bagi lembaga fatwa MUI untuk menjadi bagian dari tata hukum positif. Jika ditinjau secara kelembagaan negara, maka MUI berada pada ranah kawasan infra struktur politik. Infra Struktur Politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada didalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. infra strukutr lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat. tersebut. Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat (Masyarakat). Dari sekian banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah: Partai Politik, Golongan Penekan, Golongan Kepentingan, Tokoh Politik, Alat Komunikasi Politik, dan Organisasi Non Pemerintah, termasuk didalam Organisasi Non Pemerintah ini adalah : LSM, NGO, Ormas dan sebagainya.

Sedangkan yang kedua adalah supra struktur (*the goverment political sphere*). Yaitu suatu kehidupan politik pemerintahan, yang nampak dari luar, dikatakan nampak dari luar, karena supra struktur dalam actionnya sangat terasa dan terlihat. Denyut kehidupan supra struktur dapat dirasakan kasat mata oleh orang awan sekalipun. Sebab supra struktur inilah yang mengurus langsung hajat hidup orang banyak. Pada sektor ini terdapat lembaga-lembaga negara yang mempunyai

peranan dalam proses kehidupan politik (pemerintahan). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang dalam UUD 1945 diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Antara lain adalah MPR, DPR, Presiden, DPD, MA, MK, KY.

Jika diamati dan di analisa maka penulis berpendapat bahwa kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam, apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti (tidak mengikat).

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanatkan dalam MUNAS VI tahun 2000, MUI membentuk sepuluh komisi, yaitu Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Fatwa, Komisi Dakwah Islam, Komisi Hubungan Luar Negeri, Komisi Perintis Perempuan, Keluarga dan Remaja, Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama, Komisi Pendidikan Islam, Komisi Perekonomian Islam, Komisi Pengembangan Hukum dan Perundang-undangan, dan Komisi pengkajian dan pengembangan. Pembentukan komisi-komisi tersebut berdasarkan Surat Keputusan MUI Pusat No.Kep- 419/MUI/IX/2000.<sup>59</sup> Di antara komisi-komisi itu adalah Komisi Fatwa. Pembentukan Komisi Fatwa ini bertujuan untuk menelaah, membahas, merumuskan serta memutuskan suatu persoalan atau permasalahan yang diajukan seseorang atau kelompok.

Atas gambaran dari perangkat kerja seperti di atas, maka MUI Kabupaten Indramayu sebagai lembaga fatwa merasa berkepentingan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang bimbingan keagamaan sekaligus memberikan kejelasan mengenai prinsip dan pandangan keagamaan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain, maka dalam hal ini, terkait dengan keberadaan Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang yang dianggap menyimpang, pada hari 24 September

---

<sup>59</sup> Cik Hasan Bisri *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: 2004,hal. 92

2007, MUI Kabupaten Indramayu yang diketuai KH Ahmad Jamali mengeluarkan fatwa sesat kepada Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang.<sup>60</sup>

Keputusan fatwa sesat MUI Kabupaten Indramayu kepada Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang dilandaskan pada 10 kriteria yang telah ditetapkan pada penutupan rakernas MUI di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (6/11/2007).

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang berjumlah 6 butir
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan sunnah.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran.
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, salat wajib tidak 5 waktu.

---

<sup>60</sup> Kronologi Kasus Dayak Losarang, diakses dari <http://www.desantara.or.id/2007/06/kronologi-kasus-dayak-losarang/> pada tanggal 30 April 2015

10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya

Dari kesemua kriteria tersebut, MUI Kabupaten Indramayu menganggap bahwa label kesesatan sudah pantas diterima oleh Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang, ditambah setelah menimbang dan menelaah bahwa:

1. Menganggap bahwa Takmad telah menyatakan tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Takmad telah berkeyakinan bahwa kelahiran manusia ke dunia ini dikarenakan adanya alam atau adanya alam menyebabkan manusia itu ada di dunia ini.
2. Menganggap bahwa Takmad telah menyatakan dirinya pernah ditawarkan oleh seseorang untuk memilih salah satu diantaranya agama yang ada di Indonesia, tetapi ia menolak dengan alasan bahwa dirinya sudah memiliki keyakinan sendiri yaitu dengan belajar dari alam / Ilmu ngaji rasa yang bersifat langgeng.
3. Menganggap Takmad telah menyatakan bahwa dalam Agama para penganutnya sangat kental dengan unsur keduniawian, suka berbohong, menipu orang lain, mengambil hak orang lain, zina, ingin hidup mewah, dan lainnya. Sedang keyakinan yang dianutnya tidak perlu dan tidak mau melakukan hal itu semua.
4. Pada hari selasa tanggal 19 Juli 2005 di Padepokan Suku Dayak bapak Takmad mengatakan bahwa orang Islam sembahyang lima waktu sehari semalam menghadap Ka'bah dan Ka'bah itu terbuat dari batu, maka berarti selama ini orang Islam sembahyang menyembah batu.

5. Bahwa mereka tidak mau membuat Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, maupun Kartu Keluarga serta tidak mau menggunakan helm ketika berkendara.
6. Sekolah bagi anak-anaknya tidak pernah diwajibkan karena banyak orang pintar tapi tidak benar. Yang penting kita belajar kebenaran.
7. Takmad menyatakan bahwa mereka tidak bisa disalahkan, karena kita juga membantu Agama dan Negara.
8. Takmad telah menyatakan bahwa dirinya dulu senantiasa dibohongi oleh ustadz dan Kiai yang menginformasikan adanya hari kiamat, surga, neraka. Padahal ustad sendiripun itu belum tahun tentang hal itu.
9. Camat Losarang menyatakan bahwa mereka sering meminta keistimewaan-keistimewaan khusus perlakuan Pemerintah dari masyarakat lainnya.

Menyimpulkan :

*Pertama* : Bahwa ajaran Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang adalah ajaran sesat yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan keberadaannya itu membuat keanehan dan menimbulkan keresahan bagi umat Islam serta mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

*Kedua* : bahwa busana yang dipakai oleh penganut ajaran Suku Dayak Hindu Buda Bumi Segandu dengan segala aksesorisnya dinilai bertentangan dengan akhlak mulia dan norma-norma susila serta adat ketimuran, utamanya bertentangan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera (Remaja).

*Ketiga* : Menyerukan agar Ummat Islam mengindahkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama terutama Islam yang pernah mereka anut dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah di muka bumi ini.

*Keempat* : Mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu selaku Ketua Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk mengeluarkan larangan dan pembekuan terhadap aliran Suku Dayak Losarang yang dibarengi dengan pembinaan secara intensif demi terpeliharanya kemurnian ajaran agama sesuai falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila dan Undang-undang Dasar RI tahun 1945 serta ketertiban dalam berbangsa dan bernegara.<sup>61</sup>

Terbitnya fatwa sesat dari MUI Kabupaten Indramayu tidak membawa dampak, keresahan dan intimidasi yang dibarengi dengan perlawanan Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segadu terus berlangsung. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam alur kejadian sebagai berikut:

- Rabu, 12 September 2007  
MUI dan Ormas-ormas Islam se-Kabupaten Indramayu mengadakan musyawarah, dengan hasil berupa permintaan terhadap masyarakat agar menghentikan dan melarang aliran sesat yang mengatasnamakan ajaran Islam dan mendiskreditkan agama.
- Rabu, 19 September 2007

---

<sup>61</sup> <http://muikabindramayu.blogspot.com/> diakses pada 30 April 2015



PCNU mengecam Depag (Departemen Agama) terkait lambatnya respon Pakem terhadap anggapan sesat Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang. Bahkan, para ulama mengecam sikap Kantor Depag Kabupaten Indramayu yang dinilai lamban serta terkesan membiarkan aliran yang dianggap sesat tersebut tumbuh subur. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Rois Suriah PCNU Kabupaten Indramayu, KH Saeroji Bilal. Ia juga mendesak Depag untuk segera melakukan langkah konkret dengan munculnya sejumlah aliran yang dianggap sesat di tengah masyarakat. Ia menilai, Depag terkesan lepas tangan dengan maraknya aliran sesat di tengah masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengikut Suku Dayak Losarang hingga ke pelosok desa.

- Minggu, 23 September 2007  
Penindaklanutan hasil fatwa yang menyatakan Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Losarang sebagai aliran sesat, MUI Kabupaten Indramayu kembali menggelar pertemuan di Islamic Centre. Selain membahas lanjutan sosialisasi peraturan daerah (perda) larangan minuman beralkohol dan prostitusi, serta wajib belajar Madrasah Diniyyah, MUI bersama ormas Islam juga merapatkan barisan, guna segera membekukan aliran yang dianggap sesat tersebut.
- Senin, 24 September 2007  
Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang mendatangi DPRD Kabupaten Indramayu. Di hadapan Ketua DPRD Kab Indramayu, H Hasyim Junaedi, dua anggota komunitas bernama Dedi dan Warlam Wanalas menyatakan saat

ini komunitasnya resah menyusul adanya pernyataan MUI Kabupaten Indramayu. Selain fatwa MUI Indramayu, hal lain yang juga memicu keresahan di Komuntas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang adalah adanya pernyataan Camat Losarang Drs. Prawoto yang menyatakan bahwa Komuntas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang telah membahayakan eksistensi negara dan pemerintahan sekaligus minta dibekukan. Kepada pihak DPRD Kabupaten Indramayu, Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu meminta agar tidak diganggu dan dibekukan aktifitasnya.

- Senin, 22 Oktober 2007  
MUI kembali menguatkan fatwa sesat terhadap Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang
- Kamis, 8 November 2007  
Pernyataan penolakan pembubaran oleh para pengikut Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang.
- Selasa, 20 November 2007  
Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang melakukan *hearing* bersama Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Aliansi Bhineka Tuggal Ika (ANBTI) dan Jaringan Kerja Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (JKBB), menuju Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu untuk menemui Bakor Pakem sebagai bentuk keberatan atas pembekuan aktivitas komunitas Dayak Losarang oleh MUI dan Pakem.

## **BAB IV**

### **PERLAWANAN SUKU DAYAK TERHADAP ISLAMISASI DI INDRAMAYU**

#### **A. Sikap Suku Dayak Terhadap Fatwa MUI Kabupaten Indramayu**

Turunnya fatwa MUI Kabupaten Indramayu yang menegaskan anggapan bahwa Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang merupakan aliran yang menyimpang dari ajaran Islam dan perlu dilakukan upaya penghentian atas segenap aktivitas yang dilakukannya ternyata tidak menyurutkan rutinitas keseharian Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang. Semenjak vonis fatwa sesat diterbitkan MUI Kabupaten Indramayu pada tanggal 24 September 2007, komunitas adat ini tetap melakukan ritual *pepe* atau berjemur di bawah terik matahari yang biasa dilakukan pada hari Kamis. Di bawah sengatan matahari mereka berjemur dengan melantunkan kidung berbahasa Jawa yang berisi puji-pujian kepada sang pencipta yang dipimpin Takmad Diningrat. Selain ritual itu ada juga ritual *Kungkum* atau berendam dalam air yang ada di parit sekeliling Padepokan Dayak Losarang. Semua badan terendam air dan hanya menyisakan kepala yang menengadah ke atas langit. Ritual *Kungkum* juga untuk merenungi kebesaran sang pencipta sekaligus sebagai sarana melatih kesabaran dalam penderitaan dalam keadaan yang sulit.<sup>62</sup>

Takmad Diningrat menilai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Indramayu sangat tidak mendasar. Takmad

---

<sup>62</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/84304/dayak-losarang-abaikan-vonis-mui>. diakses pada 30 April 2015.

menganggap bahwa ritual yang dilakoninya selama ini murni bersumber dari keyakinannya, di mana sebuah keyakinan tidak bisa dipaksakan atau dilepaskan.<sup>63</sup>

Tekanan kelompok masyarakat yang tidak menghendaki dilakukannya ritual-ritual serta ajaran yang diberikan dalam Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang terjadi dalam beberapa tahap hingga tahun 2009. Takmad, sebagai pimpinan tertinggi komunitas adat tersebut tetap mengajak para pengikutnya untuk tidak mempedulikan segala bentuk intimidasi dan tekanan yang ada.<sup>64</sup>

Selain kegiatan rutin keseharian, ritual besar tahunan juga tetap diselenggarakan Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang, di antaranya kegiatan Ruatan Putri Kraton Suku Dayak Bumi Segandu yang sebenarnya merupakan serangkaian acara yang bersifat simbolisasi mengenai ajaran Takmad, di dalamnya mengandung pesan bahwa segala sesuatunya dikembalikan kepada masing-masing individu manusia<sup>65</sup>. Kegiatan Ruatan Putri Kraton Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang ini dilaksanakan pada tanggal 18–26 Februari 2009. Seminggu pertama diisi dengan pameran adat dan budaya, dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu Ruatan Putri Kraton, dan hari terakhir ditutup dengan pertunjukan wayang kulit untuk masyarakat sekitar. Acara arak-arakan Ruatan Putri Kraton yang bersifat simbolis diisi dengan atraksi reog atau *wayang wong* kemudian diisi pula dengan atraksi *kebo ngamuk* sebagai lambang karakter masing-masing manusia. Menurut Takmad, hal ini

---

<sup>63</sup> Wawancara Takmad Diningrat, 30 April 2015

<sup>64</sup> Radar Cirebon, Edisi 26 Februari 2009

<sup>65</sup> Wawancara Takmad Diningrat, 30 April 2015

menggambarkan bagaimana seharusnya keharmonisan antar manusia, baik dengan manusia lainnya maupun dengan alam dapat terwujud.

Terlepas dari makna kegiatan tersebut, kegiatan ini relatif berjalan baik, karena antusiasme dan partisipasi masyarakat sekitar cukup tinggi. Masyarakat sekitar memberikan dukungan berupa tenaga maupun materi untuk keberlangsungan kegiatan tersebut. Namun tetap saja, kegiatan ini sempat mendapat sorotan seorang tokoh agama bernama KH. Amin Bay seperti dilansir harian umum Radar Cirebon, tak kalah tajamnya ancaman pembubaran diutarakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Hasyim Djunaedi SAg MBA yang mendesak agar aparat Kepolisian Resort Indramayu segera bertindak tegas terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Suku Dayak Losarang. Dia menganggap bahwa kegiatan Ruatan Putri Kraton telah melanggar keputusan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Pakem.

## **B. Bentuk Perlawanan Suku Dayak Terhadap Islamisasi di Indramayu**

Bentuk perlawanan yang dilakukan Takmad Diningrat dan komunitas adat yang dipimpinnya tidak hanya dilakukan dalam bentuk pengabaian terhadap tekanan dan intimidasi fatwa sesat MUI Kabupaten Indramayu. Takmad mengaku dirinya juga membutuhkan sebuah jaminan untuk diberikan kepada para pengikutnya guna dapat menjalankan keyakinan dengan tenang dan tanpa hambatan.

Sejak tahun 2007, di mana fatwa sesat MUI Kabupaten Indramayu dikeluarkan, Takmad bersama beberapa perwakilan

komunitas adat yang dipimpinnya mencoba melakukan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Takmad berpendapat bahwa kepercayaan dan keyakinan yang dijalankannya selama ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban perlindungan negara.<sup>66</sup>

Takmad mengakui, segenap upaya untuk melakukan perlawanan dan menjamin perlindungan untuk para pengikutnya masih ia lakukan, hal itu seiring dengan intimidasi beberapa kelompok ormas dan MUI Kabupaten Indramayu yang dianggapnya melakukan hal tersebut tidak lepas dari kepentingan unsur politik daerah, hingga sekarang.

Selain melakukan upaya perlawanan dalam bentuk aktifitas dan ritual, Komunitas Dayak Hindu-Budha juga melakukan perlawanan dalam segi pandangan hidup dan prinsip keyakinan.

Takmad Diningrat sebagai pemimpin komunitas adat ini selalu menekankan bahwa keyakinan yang dianut dan dijalankannya tidak merugikan orang lain. Bahkan, Takmad menjamin bahwa keyakinan yang dianut oleh bagian dari masyarakatnya tidak bertentangan dengan agama mayoritas masyarakat Indramayu.

Dalam kehidupan sehari-hari, Takmad menjamin kebebasan bagi para pengikutnya untuk tetap memeluk agama-agama besar. Saat ini, puluhan orang pengikutnya tetap memeluk agama Islam serta 3 kepala keluarga tetap percaya kepada agama Kristen meski mereka secara sukarela menjalankan prinsip hidup dan ritual yang biasa dilakukan oleh komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara Takmad Diningrat, 30 April 2015

<sup>67</sup> Wawancara Takmad Diningrat, 30 April 2015

Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang memiliki pandangan hidup keberagamaan bahwa keselamatan seseorang tidak bisa dijamin oleh kelembagaan sebuah agama. Takmad menekankan prinsip keselamatan manusia terletak pada kesucian hati pribadi masing-masing. Ketergantungan seseorang kepada kelompok agama tertentu justru dapat menjerumuskan seseorang ke dalam lembah keburukan, sehingga turut mewarnai pandangannya yang merasa lebih tinggi di banding orang lain.

Kritik dan pandangan keberagamaan tersebut dituangkan Takmad Diningrat dalam sebuah penggalan pujian *ngajirasa* yang secara rutin dibacakan di tengah Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang setiap malam Jumat Kliwon.

*Jare ucapan sekecap nyata ucapane*

*Nyata iku nimbulaken cempelak sempela*

*Ne ana jare sadat tohid diucapaken mung ning atine dewek*

*Ladala ning kono sadat tohid sedakep sinuku tunggal*

*Langsung ning kono ilang tanpa lerana*

“Konon ucapan itu akan berdampak, berdampak pada keselamatan dan kehinaan. Kalau saja sahadat tauhid diucapkan cukup di dalam hati, nah itu yang akan menjadikan agamamu akan benar-benar menjiwai”.

Takmad Diningrat juga menekankan pada pengikutnya untuk mengisi hidup dengan berbagai contoh yang baik kepada sesama manusia. Menurut Takmad, sangat disayangkan jika selama ini prinsip-prinsip penting dalam sebuah agama justru hanya

diberangus oleh hal-hal formil yang tidak akan membawa manusia dalam kebahagiaan bentuk apapun. Takmad mengkritik semua penganut agama besar yang pada dasarnya memiliki kewajiban yang sama, yakni berbuat baik kepada sesama serta diamanatkan untuk menjaga alam semesta.

*Ngajirasa*, ajaran yang diakui Takmad sebagai jalan menuju pemurnian diri, juga diungkapkannya sebagai prinsip murni dalam agama apapun. Di dalam ajaran *Ngajirasa*, ia mendidik setiap pengikutnya untuk bisa mengendalikan diri dari “TIGA TA” (harta, tahta, dan wanita). Bagi para pengikut yang telah menikah, suami harus sepenuhnya mengabdikan diri pada keluarga. Suami tidak boleh menghardik, memarahi, atau berlaku kasar terhadap anak dan istrinya. Oleh karena itu, perceraian merupakan sesuatu yang dianggap pantang terjadi. Demikian juga, hubungan di luar pernikahan sangat ditentang.

Takmad mengungkapkan, *Ngajirasa* juga mengajarkan untuk saling mengasihi kepada sesama umat manusia yang secara praktik telah ditinggalkan oleh para penganut agama-agama besar. Misalnya, menolong orang yang sedang kesulitan walaupun berbeda kepercayaan, tidak menagih hutang kepada orang yang diberi pinjaman, karena menurut dia, yang terbaik adalah membiarkan orang yang berhutang tersebut untuk membayar atas kesadarannya sendiri. Demikian juga dalam hal mendidik anak, sebaiknya tidak terlalu banyak mengatur karena yang bisa mengubah sikap dan perilaku adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jalan menuju permurnian diri juga ditunjukkan dengan hidup yang sederhana, menjauhi keinginan mengejar kesenangan



duniawi, menghilangkan perasaan dendam, penasaran, dan iri kepada orang lain.

Konsepsi tentang alam tampak dari keyakinan bahwa dunia berasal dari bumi segandu (bumi yang masih bulat)<sup>68</sup> bernama Indramayu. Bumi segandu kemudian menimbulkan lahar menjadi daratan, kekayon, dan air. Setelah itu muncul alam gaib. yang mengendalikan semua itu adalah Nur Alam, yang menurut Takmad, agama Islam dan lainnya juga dituntut dalam tanggungjawab yang sama.

Menanggapi segenap intimidasi dan diskriminasi yang diterima kelompoknya, Takmad mengaku tak pernah menyarankan atau memerintahkan para pengikutnya untuk berbalas dendam, karena jika dilakukan, maka hal itu justru akan menodai prinsip kesucian yang menjadi dasar ajarannya.

*Ana sing jawabane sing dijawab*

*Lah unie isie sekecap nyata*

*Isie menusa mung jawabe langka maning*

*Lah engko ning kono sura denawa*

*Surakuh wis ngarani denawa*

*Iku gede lan pada-pada gedene*

*Gua Palimanan yah ... mung nerima wujud putih.*

“Ada yang perlakuan serba dibalas

Nah, malah substansinya sekecap

Intinya membalas itu tanpa arti

Malah nanti justru “sura denawa”

---

<sup>68</sup> Wawancara Takmad Diningrat 30 April 2015

Sura itu ya sekaligus denawa

Sama-sama merasa besar

Kita sebagai gua Palimanan, ya, cukup merima kesucian.”

Dari kidung ini Takmad Diningrat menyatakan bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak bisa diartikan sebagai bentuk perlawanan balas dendam, akan tetapi hanya bersifat untuk tetap bertahan untuk mencapai puncak ketenangan dan kesucian dari ajaran yang diyakininya.

Sikap resistensi dan perlawanan Takmad sebenarnya tidak hanya dilakukan terhadap perilaku tirani mayoritas masyarakat Islam yang dilambangkan dengan keberadaan MUI Kabupaten Indramayu, akan tetapi, secara tegas Takmad menolak dalam bentuk apapun setiap hal yang terkesan memaksa dan tidak alamiah.

Takmad mengaku, penciptaannya terhadap keyakinan yang kini disampaikan kepada pengikutnya tidak terlepas dari perjalanan panjang hidupnya yang penuh getir. Ia merasa selalu menjumpai orang-orang yang berbaju agama dan kelembagaan lainnya, namun sikap hidupnya tidak mencerminkan prinsip-prinsip penting agama yang dianutnya.

Selama perjalanan hidupnya, Takmad Diningrat, mengaku banyak mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan kemiskinan. Ia pun merasa kecewa dengan sikap dan perilaku para pemimpin pemerintahan, para politisi dan pemimpin partai, serta para penganut agama yang menurut pandangannya sudah banyak

menyimpang dari hukum formal maupun ajaran-ajaran agamanya.<sup>69</sup>

Akibat dari rasa kekecewaan ini, ia memutuskan untuk tidak mengikatkan diri dengan segala peraturan pemerintahan, maupun peraturan agama manapun. Ia berprinsip bahwa kebaikan dan kebenaran tidak bisa dipaksakan, melainkan datang dari diri sendiri masing-masing orang. Oleh sebab itu, ia dan para pengikutnya, tidak mau menjadi umat atau penganut dari salah satu agama besar yang ada di Indonesia.

Di samping itu, mereka pun tidak mau mengikatkan diri dengan salah satu kelompok, golongan, maupun Partai Politik. Itu pula sebabnya, ketika negara ini tengah melangsungkan pesta demokrasi Pemilihan Umum, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden, mereka memutuskan untuk tidak memilih salah satu kandidat maupun partai, dan mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Keengganan Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang untuk terikat dengan aturan-aturan formal terbukti dari keengganan mereka membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal kepemilikan KTP dan identitas kependudukan atau kewarganegaraan adalah hak sipil bagi semua warga negara yang telah cukup umur. Salah satu penyebab keengganan anggota komunitas ini dalam memenuhi hak sipil mereka adalah karena adanya keharusan mengisi kolom agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam format KTP, sementara mereka telah bertekad untuk tidak mengikatkan diri secara formil pada salah satu agama

---

<sup>69</sup> Wawancara Takmad Diningrat, 30 April 2015.

maupun Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### C. Tawaran Solusi dan Titik Temu

Penerbitan fatwa sesat oleh MUI Kabupaten Indramayu terhadap keberadaan Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang merupakan bagian dari fenomena keberadaan lembaga tersebut yang lebih memilih untuk bersikap sebagai “polisi agama” dibanding menggali lebih dalam untuk mengedepankan pandangan keberagamaan dalam gerakan Islamisasi yang dilakukan.<sup>70</sup> Pola ini pada akhirnya seringkali menimbulkan ketegangan dengan menyasar pada kelompok lain yang dalam hakikatnya memang memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang dipakai oleh MUI. Pada posisi ini, proses dialog yang dilakukan secara terbuka antarkedua pihak menjadi alternatif paling memungkinkan demi keberlangsungan syiar Islam tanpa memberikan dampak intimidasi dan diskriminasi terhadap sebuah kelompok.

Di sisi lain, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menganut pada satu kesatuan hukum formal yang dibentuk atas dasar kesetaraan dan kemanusiaan, yakni melalui penerapan UUD 1945 dan segenap perangkat hukum negara lainnya, maka sudah sepatutnya pemerintah dan penegak keamanan turut hadir dalam memediasi keberagaman pandangan yang berpotensi konflik di tengah masyarakat. Posisi sentral ini sudah semestinya lebih dipahami sebagai satuan tugas utama dari kedua unsur pelaksana

---

<sup>70</sup> Rumadi, “*Refleksi Akhir Tahun 2007: Wajah Keberagamaan Kita*”. Diakses dari [http://wahidinstitute.org/v1/Opini/Detail/?id=117/hl=id/Refleksi\\_Akhir\\_Tahun\\_2007\\_Wajah\\_Keberagamaan\\_Kita](http://wahidinstitute.org/v1/Opini/Detail/?id=117/hl=id/Refleksi_Akhir_Tahun_2007_Wajah_Keberagamaan_Kita). Pada 30 April 2015

undang-undang tersebut, dibanding memilih untuk memihak pada suara yang dianggap sebagai pandangan mayoritas.

Dalam kasus perseteruan pandangan antara MUI Kabupaten Indramayu dan Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang tampak sekali bahwa beberapa perwakilan instansi pemerintah dan penegak hukum justru lebih memilih untuk secara singkat merespon apa yang dikemukakan oleh kelompok yang dianggap mayoritas umat Islam melalui representasi MUI. Dalam rangkaian alur konflik yang terjadi antara MUI Kabupaten Indramayu dengan Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang ini terbukti bahwa di dalamnya telah melibatkan Camat, Kementerian Agama, aparat keamanan, yakni Polisi dan TNI, serta DPRD dalam menguatkan kebijakan yang diskriminatif bahkan berpotensi pada tindakan yang intimidatif dan berpeluang terjadinya tindak kekerasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang merupakan sebuah komunitas independen yang tidak mengikatkan diri pada salah satu agama, organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, partai politik tertentu, maupun organisasi kemasyarakatan.

Warga komunitas ini meyakini ajaran yang diajarkan oleh pimpinan mereka, Takmad Dinigrat, yang disebut dengan ajaran “Sajarah Alam Ngaji Rasa”. Inti ajaran ini adalah mencari kebenaran, melalui penyatuan diri dengan alam, pemuliaan terhadap lingkungan alam, pengabdian kepada keluarga, berperilaku jujur dan sabar.

Istilah suku Dayak yang mereka kenakan sebagai identitas kelompok ini, bukanlah “suku” dalam etnik (suku bangsa), melainkan sebuah istilah dalam bahasa Jawa Indramayu. Demikian pula kata “Dayak” bukan dalam arti suku bangsa Dayak, melainkan juga diambil dari kata dalam bahasa Jawa Indramayu, yang artinya menyaring/memilih.

Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang merupakan satu kelompok masyarakat tradisional di Kabupaten Indramayu yang kerap terlibat dalam perlawanan terhadap gerakan Islamisasi di wilayahnya. Pada mulanya, Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang memang lahir dari tradisi masyarakat penganut Islam secara keumuman. Takmad

Diningrat, tokoh utama dibalik eksistensi komunitas pada mulanya bersentuhan erat dengan sebuah padepokan bela diri yang kental dengan nuansa Islam. Dalam perjalanannya, Takmad lebih memilih untuk keluar dari Islam secara pribadi dengan dalih sebuah agama tidak menjamin keteraturan sikap hidup seseorang.

Keberadaan prinsip hidup sekaligus pola keberagamaan yang dianggap berbeda dari keumuman masyarakat muslim di Indramayu ini pada akhirnya mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu untuk menerbitkan fatwa sesat pada tanggal 24 September 2007. Fatwa tersebut dimunculkan hanya atas pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada sumber luar dan anggapan-anggapan tanpa melalui dialog dan kajian perspektif yang lebih mendalam. Selain itu, semangat fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI atas ritual dan kepercayaan Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang juga seiring sejalan dengan gerakan formalisasi perundang-undangan daerah berbasis Islam di Indramayu sebagai dampak dari fenomena yang sama yang telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sejak memasuki era reformasi.

Di sisi lain, polemik perbedaan pandangan yang muncul antara MUI Kabupaten Indramayu dan Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang berjalan beriringan dengan upaya Islamisasi mayoritas muslim melalui usaha-usaha penerapan perundang-undangan berbasis syariah. Dalam kurun waktu 5 tahun, yakni sejak tahun 1999 hingga 2004, usaha Islamisasi melalui penerapan perundang-undangan berbasis syariat telah mampu tersimpul dalam beberapa produk kebijakan hukum yang digunakan untuk penertiban masyarakat publik, antara lain Perda

No. 7 Tahun 1999 dan perubahannya No. 4 tahun 2001 tentang prostitusi, Perda No 2 Tahun 2003 tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, Perda No. 30 tahun 2001 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman keras revisi perda No.7 tahun 2005, Surat Edaran Membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum beraktifitas, Surat Edaran Mengumandangkan azan secara serentak tepat waktu pada setiap waktu sholat dan mendirikan salat berjamaah di masjid, musala, langgar yang ada dilingkungan kantor, dinas, instansi, sekolah, madrasah, perusahaan dan masyarakat, Surat Edaran menghentikan atau menutup aktifitas perkantoran selama 20 menit yaitu 10 menit sebelum dan sesudah sholat fardlu , Surat Edaran berpakaian baju takwa atau busana muslim (jilbab) pada setiap hari Jumat bagi pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indramayu, Surat Edaran membiasakan puasa Senin-Kamis, serta Surat Edaran membiasakan mengeluarkan zakat, infaq, shodaqoh melalui BAZ untuk kepentingan umat manusia.<sup>71</sup>

Meskipun fatwa MUI bukan merupakan bagian dari perundang-undangan formal berbasis syariat dan pada dasarnya berlaku tidak secara mengikat, namun arogansi dengan mengatasnamakan agama berdasarkan semangat Islamisasi ini pada akhirnya memunculkan berupa tindakan-tindakan provokatif yang meresahkan masyarakat luas dan berujung pada pembubaran paksa setiap ritual yang sedang dilaksanakan oleh para penganut

---

<sup>71</sup> Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indramayu Bidang Keagamaan dan Hukum, Bagian Kesra dan Hukum Setda Kabupaten Indramayu. Lihat juga dalam Mulih Harja, *Kebijakan Keagamaan di Kabupaten Indramayu*, Jendela Informasi Wong Dermayu, edisi 15 Agustus – 15 September 2004



kepercayaan Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang. Dalam hal ini, Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang melakukan upaya-upaya perlawanan melalui dua bentuk, yakni, pertama, aksi perlawanan melalui reaksi fisik dengan memanfaatkan posisi dan kedudukan yang sama di mata prinsip hak dan asasi manusia (HAM). Dan yang kedua, melalui kritik-kritik yang disampaikan oleh Takmad Diningrat kepada para pengikutnya melalui doktrin-doktrin ajaran yang tersimpul dalam pandangan besar ilmu alam *Ngajirasa*.

Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang memiliki pandangan hidup keberagamaan bahwa keselamatan seseorang tidak bisa dijamin oleh kelembagaan sebuah agama. Pemimpin komunitas kepercayaan tersebut yakni Takmad Diningrat, menekankan kepada para pengikutnya bahwa prinsip keselamatan manusia terletak pada kesucian hati pribadi masing-masing. Dia juga berpendapat bahwa ketergantungan seseorang kepada kelompok agama tertentu justru dapat menjerumuskan seseorang ke dalam lembah keburukan, sehingga turut mewarnai pandangannya yang merasa lebih tinggi di banding orang lain.



**LEMBAGA DAKWAH**  
*Nahdlatul Ulama*

## DAFTAR PUSTAKA

- A.S Arifin, *Melihat Kembali Visi Misi Pemkab Indrmayu* dari <http://denpatrol.com>. 30 April 2015
- Abdurrahman Wahid , KH. 2006. “*Arabisasi, Samakah dengan Islamisasi?*”, dalam *Islamku, Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute
- Abdurrahman Wahid, KH. 2001. “*Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*”, Depok: Desantara.
- Abdurrahman Wahid , KH. “*Salahkah Jika Dipribumikan?*”, *Tempo*. 16 Juli 1983.
- Abu-Lughod, Lila. “*The Romance of Resistance: Tracking Transformation of Power Trough Bedouin Women*” diakses dari <http://www.jstor.org/pss/645251>,. 30 April 2015
- Al-Anshori, Mahmud. 2005. *Penegakkan Syariat Islam Dilemma Keummatan di Indonesia*, Jakarta: Inisiasi Press
- Anshari, H. Endang Saifuddin, MA. 1991. *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Arief Furchan dan Agus Maimun. 2005. *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai tokoh* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. *Tata Urut Perundang- Undangan Dan Problema Peraturan Daerah*, [http://www.legalitas.org.id//Artikel HTN/tata urutan per UUan \(Jimly\)](http://www.legalitas.org.id//Artikel%20HTN/tata%20urutan%20per%20UUan%20(Jimly).htm). Htm. 30 April 2015
- Azra , Azyumardi. 1999. *Renaissans Islam Asia Tenggara*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Basrowi dan Sukidin, ed.,. 2003.. *Teori- teori perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Bisri Cik Hasan. 2004. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* , Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Darmawan, Yusran. "Resistensi dalam Kajian Antropologi", diakses dari <http://www.timur-angin.com/2009/08/resistensi-dalam-kajian-antropologi.html>. 30 April 2015
- Dayak Losarang Abaikan Vonis MUI Diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/84304/dayak-losarang-abaikan-vonis-mui>. 30 April 2015
- Erni Budiwanti, Dr. 2000 *"Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima"*, Yogyakarta: LkiS.
- Forum Studi Asy-Syari'ah; *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, volume 25, Nomor 2, Juli-Desember 2002
- Geertz, Clifford. 1981. "Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa", terj. Aswab Mahasin. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- Harja, Mulih. *Kebijakan Keagamaan di Kabupaten Indramayu*, Jendela Informasi Wong Dermayu, edisi 15 Agustus – 15 September 2004
- Kartodirjo, Sartono. 2015. "Pemberontakan Petani Banten 1988", terj. Hasan Basari. Depok: Komunitas Bambu.
- Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang Abaikan Vonis MUI* diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/84304/dayak-losarang-abaikan-vonis-mui>. 30 April 2015
- Kronologi Kasus Dayak Losarang*, diakses dari <http://www.desantara.or.id/2007/06/kronologi-kasus-dayak-losarang/> pada tanggal <http://muikabindramayu.blogspot.com/>. 30 April 2015
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat Islam, Budaya Demokrasi, Dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca-orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Profil Kecamatan Losarang, <http://www.indramayukab.go.id>. 30 April 2015

Quraaisy Shihab, M. 2003. Tafsir Al-Misbah, *Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati.

Radar Cirebon, Edisi 26 Februari 2009

Radar Cirebon, Edisi Senin, 24 September 2007

Rahmat Subagyo dalam Suwarno Imam. 2005. *Konsep Tuhan, Manusia dan Masyarakat dalam Berbagai Kejawaran Jawa*, Jakarta: Rajagrafindo Pertama

Rais, Muhammad. *HEGEMONI ELIT DALAM RITUS AGAMA LOKAL: Studi Keberagaman Masyarakat Bugis Bone Sulawesi Selatan*. Jurnal Infopub, el-Harakah; Vol 12, No. 2 2010.

Ricklefs, Marle Calvin. 2001. *"A History of Modern Indonesia since c. 1200"*. California: Stanford University Press.

Ritzer , George. 2000. *Sociological Theory*, Fifth edition, University Of Maryland.

Roy, Oliver. 2003. *Gagalnya Islam Politik*, terj. Harimurti dan Qomaruddin SF, Jakarta: Serambi.

Rumadi, *"Refleksi Akhir Tahun 2007: Wajah Keberagaman Kita"*. Diakses dari [http://wahidinstitute.org/v1/Opini/Detail/?id=117/hl=id/Refleksi\\_Akhir\\_Tahun\\_2007\\_Wajah\\_Keberagaman\\_Kita](http://wahidinstitute.org/v1/Opini/Detail/?id=117/hl=id/Refleksi_Akhir_Tahun_2007_Wajah_Keberagaman_Kita). 30 April 2015

Saefudin, Achmad Fedyani. 1986. *Konflik dan Integrasi Perbedaan Paham dalam Agama Islam*, Jakarta: Rajawali.

Sangaji, Arianto. 2000. *PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Scott, James. C, 1981, *Moral ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES

- Sihbudi, Riza dan Moch. Nurhasim, ed. 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas*. Jakarta: Grasindo
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Solihin, Lukman. *Kepercayaan Marapu: Telaah atas konsep Tuhan, Nenek Moyang, dan Roh Halus pada Masyarakat Sumba*, Jurnal Infopub, el-Harakah; Vol 12, No. 2 2010.
- Stepanus Djuweng, dkk. *Kisah Dari Kampung Halaman Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan*, Yogyakarta, 1996
- Suminto, Aqib. 2002. “*Islam Indonesia Sepanjang Sejarah*”, dalam Abdurrahman (Eds.), 70 Tahun H.A. Mukti Ali: *Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993 Sumardjo, Jacob. “*Arkeologi Budaya Indonesia: Pelacakan Hermeneutis-Historis terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia*”, Yogyakarta: Kalam.
- Tarrow, Sidney. *Power in Movement*, Vol. 18, No. 1 (Mar., 1997)
- Wahid, Masykur. *WIWITAN BADUY: Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes Banten*. Jurnal Antropologi Indonesia Edisi 61 Tahun 2000.

- W.J.S Purwadarwita. 1987. *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Woordward, Mark R. 2004. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Yogyakarta: LkiS
- Yusuf Qordhowi, Dr. 2001. *Kebudayaan Islam Eksklusif atau Inklusif*, Solo: Era Intermedia
- Zada, Khamami. 2006. “*Mengantar Da’i sebagai Pendamping Masyarakat*” dalam *Dakwah Transformatif*. Jakarta: PP. Lakpesdam NU
- Zubir, Zaiyardam. 2002. *Radikalime Kaum Pinggiran: Studi tentang Idiologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*, Yogyakarta: Insist Press.



**LEMBAGA SENI BUDAYA MUSLIMIN INDONESIA**  
**NAHDLATUL ULAMA**





UNUSIA

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
INDONESIA

<https://unusia.ac.id>

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah menyoroti tentang proses perlawanan yang dilakukan Komunitas Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang atas fatwa sesat yang dikeluarkan MUI Kabupaten Indramayu dalam menyikapi tradisi dan keyakinan mereka, serta perlawanan terhadap gerakan Islamisasi yang ditandai dengan munculnya gagasan penerapan perundang-undangan daerah (perda) berbasis syariah. Studi ini dimulai dari penyajian data tentang fenomena gerakan Islamisasi, pemberlakuan perda syariah, serta penerbitan fatwa sesat oleh MUI Kabupaten Indramayu pada tahun 2007 yang berimbas pada terancamnya keberlangsungan kebebasan berkeyakinan dan keberlangsungan tradisi lokal yang telah dijalankan oleh Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang karena dianggap berseberangan dengan hukum Islam. Dengan menggunakan pandangan teori perlawanan dan wacana gerakan dakwah dengan paradigma puritanisme keagamaan, studi ini menghimpun dua hal bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Losarang, yakni perlawanan secara doktrin dan kultural yang disampaikan dan dijalankan di dalam komunitas tersebut, serta, kedua, perlawanan melalui aksi pengabaian fatwa dan perjuangan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini adalah bagian dari bentuk dokumentasi atas perlawanan sebuah masyarakat sub-kultur terhadap kebijakan maupun perspektif institusi atau penganut agama mayoritas yang dianggap kurang begitu mempertimbangkan aspek masyarakat lokal.

**ISBN 978-602-73771-7-2**

